

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
SILPA dan PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL DI JAWA
TENGAH TAHUN 2012-2014**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Disusun Oleh :

Demiasari

NIM : 31401304826

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2019**

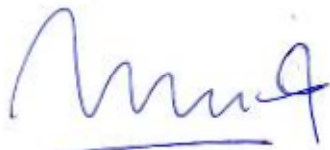
**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, SILPA dan
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN
BELANJA MODAL DI JAWA TENGAH TAHUN 2012-2014**

Disusun Oleh :
Demiasari
NIM : 31401304826

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung
Semarang

Semarang, 6 Agustus 2018

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Dra. Hj. Winarsih, SE, M. Si
NIK. 211415029

Pembimbing Skripsi



Sutapa, SE, M. Si, Ak, CA
NIK. 211496007

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, SILPA dan
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN
BELANJA MODAL DI JAWA TENGAH TAHUN 2012-2014**

Disusun Oleh :

Demiasari

NIM : 31401304826

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 27 Juli 2018

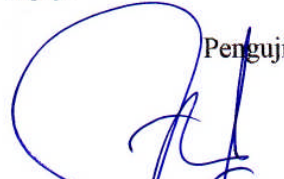
Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

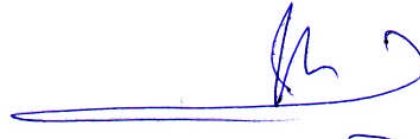


Sutapa, SE, M.Si, Ak
NIK. 211496007

Penguji



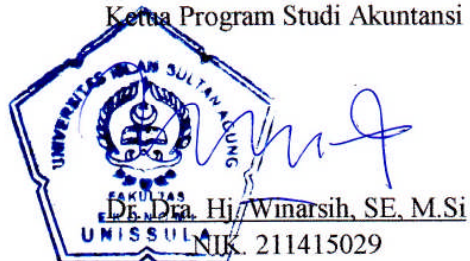
Maya Indriastuti, SE, M.Si, Ak, CA
NIK. 211406021



Dr. H. Zaenal Alim Adiwijaya, M.Si, Ak, CA
NIK. 211492005

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Tanggal 27 Juli 2018

Ketua Program Studi Akuntansi



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Demiasari

NIM : 31401304826

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, SILPA dan PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL DI JAWA TENGAH TAHUN 2012-2014 “** dan diajukan untuk diuji pada tanggal adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulis orang lain yang saya ambil dengan cara mengambil atau meniru kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagian tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Saya bersedia menarik skripsi yang saya ajukan, apabila terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain yang seolah-olah tulisan saya sendiri. Serta saya bersedia bila gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas dibatalkan.

Semarang, 6 Agustus 2018

Yang Memberi Pernyataan



Demiasari
NIM. 31401304826

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Yakinkan Dengan Iman, Usahakan Dengan Ilmu, Sampaikan Dengan Amal.

Yakin Usaha Sampai”

*Skripsi ini khusus saya persembahkan untuk ibu dan ayahku,
kakaqu tercinta, kawan-kawan seperjuanganku untuk masa
depanku*

ABSTRACT

The reseach aimed to give emprical evidence of the effect of Own Source Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Financing Surplus (SiLPA) on Capital Expenditure, and Economic Growth (PE).

The sample of this research was the budget uptake of Regional Government Budget (APBD) of Regencies and Cities in Central Java Province that have been audited by Supreme Audit Agency (BPK) during 2012-2014.

The data of this research were collected using census method. Meanwhile, the data analysis techniques used in this research were descriptive statistic test, classical assumption test, multiple regression analysis, and hypotesis testing with significance degree (α) 0,05.

The result of this research showed that Own Source Revenue (PAD) and Economic Growth (PE) had significant and positive effect on Capital Expenditure. Meanwhile, General Allocation Fund (DAU) and Financing Surplus (SiLPA) did not have positive and significant effect on Capital Expenditure.

Keywords : *Own Source Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Financing Surplus (SiLPA), Economic Growth (PE) and Capital Expenditure*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris apakah Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) , dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) terhadap Belanja Modal.

Sampel dalam penelitian ini realisasi APBD Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tahun 2012-2014.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sensus, sementara teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis dengan tingkat signifikan (α) 0,05.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Pertumbuhan Ekonomi (PE) dan Belanja Modal.

INTISARI

Sesuai tujuan otonomi daerah dan ketentuan APBD, jika Anggaran Daerah pada hakikatnya yaitu sarana dalam melakukan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat publik, maka kerangka ekonomi dalam APBD harus dapat mencerminkan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam mencari solusi agar kesejahteraan meningkatkan. Belanja Daerah adalah seluruh kewajiban yang dimiliki oleh daerah pada periode tahun anggaran yang diakui tetapi mengurangi nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah berguna untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah yang merupakan wewenang Kabupaten/Kota atau Provinsi baik urusan yang penanganan, urusan pilihan, atau urusan wajib terkait suatu bagian/bidang tertentu yang dilaksanakan bersama-sama antara pusat dan daerah ataupun antar daerah yang ditetapkan dengan peraturan yang berlaku (UU No, 32/2004).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), dan Pertumbuhan Ekonomi (PE). Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sensus, sementara teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis dengan tingkat signifikan (α) 0,05. Data diolah menggunakan program SPSS versi 16.

Berdasarkan hasil dan simpulan penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan Pemerintah Kabupaten atau Kota di Seluruh Indonesia atau Seluruh pemerintah Provinsi di Indonesia, karena dapat melihat pengaruh seluruh Pemerintah Daerah se Indonesia tidak hanya dalam cangkupan Provinsi Jawa Tengah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat ALLAH S.W.T dan segala rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Pra skripsi ini dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, SILPA dan PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL DI JAWA TENGAH TAHUN 2012-2014”**. Pra skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang.

Penulisan pra skripsi ini dilakukan dengan kerja keras dan semangat untuk pengembangan kajian ilmu pengetahuan, Khususnya Akuntansi. Penulis menyadari bahwa pra skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan serta do'a dari berbagai pihak selama penyusunan pra skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Akt, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
3. Bapak Sutapa, SE., M.Si, Akt, CA selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, motivasi, semangat dan koreksi sehingga pra skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak Judi Budiman, SE., MSc. Akt selaku Dosen Wali yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam proses penulisan pra skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal beberapa pengetahuan sebagai pedoman dalam penulisan pra skripsi.
6. Seluruh Staff, Karyawan TU, Petugas Administrasi dan seluruh Pegawai Fakultas Ekonomi yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses kuliah di FE tercinta ini.
7. Orang Tuaku tercinta (Alm Ade Hadisa dan Monira), Kaka-kakaku (Sumarlin dan Juwiarni, S.pd) tercinta yang telah memberikan untaian do'a dan motivasi yang tiada hentinya membuat penulis lebih semangat.
8. Teman-teman Kos " Aidilla" Satriani, Nurul Apriningsi, Hilda Ramadan, dan Elva Wulandari dan semuanya terimah kasih atas dukungan, saran dan kebersamaan yang diberikan selama ini.
9. Teman seperjuangan skripsi dan sekaligus teman jalan di FE Mayang Sista, SeptiawanYunanto Wicaksono, dan Santi yang selalu memberi semangat saya, beruntung ketemu sama kalian yang selalu memberi masukan pada saat saya menggeluh terimah kasih atas dukungan, saran dan kebersamaan yang diberikan selama ini.
10. Sahabat saya Umiyanti S.Pd, Surya Saputra yang ada di sulawesi biar jauh tetapi mereka selalu memberi semangat dan saran terimah kasih atas kebersamaan yang selama ini.

11. Teman-temanku Jurusan Akuntansi Ekonomi Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Angkatan 2013.

12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Semoga bantuan dan dukungan yang diberikan, dapat bernilai ibadah dan kiranyamendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Tentu saja penulis mengharapkan, skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang ekonomi.

Saya sepenuhnya menyadari, karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Olehnya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang positif demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 6 Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK	vii
INTISARI.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1. Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>)	12
2.1.1. Desentralisasi fiskal di Indonesia	13
2.1.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	15
2.1.3. Belanja Modal.....	21

2.1.4. Pendapatan Asli Daerah.....	24
2.1.5. Dana Alokasi Umum	27
2.1.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	29
2.1.7. Pertumbuhan Ekonomi	30
2.2. Penelitian Terdahulu.....	32
2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis ...	34
2.3.1. Kerangka Pemikiran Teoritis.....	34
2.3.2. Pengembangan Hipotesis.....	35
2.3.2.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal	35
2.3.2.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal	37
2.3.2.3. Pengaruh SILPA terhadap Belanja Modal	38
2.3.2.4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2. Variabel Penelitian, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	41
3.3 Populasi dan Sampel.....	43
3.3.1. Populasi Penelitian.....	43
3.3.2. Sampel Penelitian	43
3.4. Jenis dan Sumber Data	44
3.5 Metode Pengumpulan Data	44
3.6. Teknis Analisis Data.....	45
3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	45
3.6.2. Uji Asumsi Klasik	45

3.6.2.1 Uji Normalitas	45
3.6.2.2 Uji Multikolinearitas	45
3.6.2.3 Uji Autokorelasi	46
3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas	46
3.6.3. Analisis Regresi Berganda.....	46
3.6.4. Pengujian Hipotesis	47
3.6.4.1 Uji F test	47
3.6.4.2 Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>).....	48
3.6.4.3 Uji t test	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Hasil Penelitian.....	50
4.1.1 Deskripsi Sampel.....	50
4.2 Analisa Data	51
4.2.1 Statistik Deskriptif.....	51
4.2.1.1 Pendapatan Asli daerah (PAD).....	52
4.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU).....	53
4.2.1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) ...	54
4.2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi (PE).....	55
4.2.1.5 Belanja Modal (BM).....	56
4.2.2. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	56
4.2.2.1 Hasil Uji Normalitas.....	57
4.2.2.2 Hasil Uji Multikolinearitas	58
4.2.2.3 Uji Autokorelasi	58
4.2.2.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	59
4.2.3 Hasil Persamaan Regresi Linier Berganda	60

4.2.4. Uji F.....	62
4.2.5 Analisis Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>).....	62
4.2.6 Hasil Uji t.....	63
4.3 Pembahasan	64
4.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal.....	64
4.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal.....	65
4.3.3 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal.....	66
4.3.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal.....	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Keterbatasan Penelitian	69
5.3 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Definisi Operasional variable bebas.....	41
Tabel 3.2. Definisi Operasional Variabel terikat.....	43
Tabel 4.1. Daftar Kabupaten /Kota di Jawa Tengah yang Menjadi Sampel Penelitian.....	50
Tabel 4.2. Hasil Statistik Deskriptif.....	52
Tabel 4.3. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov.....	57
Tabel 4.4. Hasil Uji Multikolinearitas.....	58
Tabel 4.5. Hasil Uji Autokorelasi.....	59
Tabel 4.6. Persamaan Regresi Linier Berganda.....	61
Tabel 4.7. Hasil Uji F.....	62
Tabel 4.8. Analisis Koefisien Determinasi (R^2).....	63
Tabel 4.9. Hasil Uji t.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1. Diagram Heteroskedastisitas	60
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Perusahaan Sampel.....	75
Lampiran 2. Pendapatan Asli daerah (PAD) (Rupiah)	76
Lampiran 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif	81
Lampiran 4. Hasil Persamaan Regresi Linier Berganda	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

UU Pemerintah Daerah yang diatur dalam No.22 tahun 1999 dan UU perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diatur dalam UU No.25 tahun 1999 merupakan landasan dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang ditetapkan melalui dan daerah. Undang-undang yang mengatur perimbangan direvisi menjadi UU No.32 tahun 2004 sebagai bentuk penegasan atas wewenang pemerintahan daerah berdasar pada asas otonomi dalam mengurus dan mengatur sendiri semua keperluan bagi penyelenggaraan pemerintah. Bagi pemerintah daerah, UU tersebut tidak hanya mengatur wewenang otonomi melainkan juga mengatur dalam hal kewajiban penyampaian LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) oleh masing-masing kepala daerah kepada pusat.

Pemerintah merevisi kembali UU 22/2004 dengan UU 32/2004 sebagai penggantinya. Hal tersebut menyebabkan bergesernya pandangan atas diselenggarakannya pemeritahan. UU yang baru tersebut menginstruksikan wewenang yang jauh lebih besar dari sebelumnya, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah serta mengurus dan mengatur sendiri segala kebutuhannya. Ini akan sangat berdampak pada laju pembangunan daerah yang semakin pesat (Rosliyati, 2016).

Tujuan dari dilaksanakannya desentralisasi fiskal dan otonomi daerah adalah untuk memperdekat pelayanan publik oleh pemerintah, mempermudah

pemantauan oleh masyarakat dan mengendalikan sumber dana yang berasal dari APBD, memotivasi pembaruan di daerah dan menciptakan persaingan yang sehat antar daerah (Simanjuntak, 2015).

Dua bagian penting dari struktur APBD adalah anggaran belanja daerah dan anggaran pendapatan daerah. Belanja daerah adalah dana yang dialokasikan yang menjadi kewenangan daerah dan tolok ukur penentu dalam keberhasilan pembangunan di daerah yang penggunaannya harus dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Masyarakat menuntut kepada pemerintah supaya mampu melakukan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan baik melalui pelaksanaan otonomi daerah. Belanja daerah juga diartikan sebagai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan manfaat yang didapat lebih dari 1 anggaran dan meningkatkan kekayaan atau aset daerah dan kemudian dapat memperbesar pembelanjaan rutin (misalnya: kelompok Belanja Administrasi Umum memerlukan biaya pemeliharaan). Kelompok ini terdiri dari 2 jenis pembelanjaan baik untuk pelayanan publik ataupun bagian Belanja Aparatur Daerah (Halim, 2004).

Berbicara tentang pengelolaan keuangan daerah, akan ada keterkaitan antara perencanaan keuangan jangka panjang dengan anggaran belanja modal, khususnya pendanaan yang digunakan dalam memelihara aset tetap dari belanja modal. Konsep MTEF (*Multi-Term Expenditure Framework*) menyebutkan jika kebijakan belanja modal seharusnya mempertimbangkan *usefulness* (kemanfaatan) dan *budget capability* (kemampuan keuangan pemerintah daerah) untuk jangka panjang pengelolaan aset (Abdullah dan Halim, 2006).

Sesuai tujuan otonomi daerah dan ketentuan APBD, jika Anggaran Daerah pada hakikatnya yaitu sarana dalam melakukan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat publik, maka kerangka ekonomi dalam APBD harus dapat mencerminkan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam mencari solusi agar kesejahteraan meningkat. Belanja Daerah adalah seluruh kewajiban yang dimiliki oleh daerah pada periode tahun anggaran yang diakui tetapi mengurangi nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah berguna untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah yang merupakan wewenang Kabupaten/Kota atau Provinsi baik urusan yang penanganan, urusan pilihan, atau urusan wajib terkait suatu bagian/bidang tertentu yang dilaksanakan bersama-sama antara pusat dan daerah ataupun antar daerah yang ditetapkan dengan peraturan yang berlaku (UU No, 32/2004).

Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan jika belanja daerah dapat dikelompokkan ke dalam 2 bagian yaitu 1) Belanja tidak langsung (contohnya: belanja pegawai) dan 2) belanja langsung (contohnya: belanja fasilitas publik seperti renovasi jembatan dan jalan yang rusak). Masyarakat belum sepenuhnya dapat menikmati besarnya jumlah anggaran belanja tidak langsung ini secara maksimal.

Idealnya, komposisi anggaran seharusnya berbanding terbalik dengan jumlah belanja langsung. Bila terjadi suatu kondisi dimana komposisi anggaran yang terlalu banyak akan menyulitkan pemerintah daerah untuk membangun daerahnya sebab minimnya dana untuk pembiayaan pembangunan berbagai fasilitas umum yang diperlukan masyarakat untuk menumbuh kembangkan sektor

perekonomian walaupun pemerintah daerah telah memperoleh bantuan anggaran belanja daerah yang berasal dari pusat.

Pemerintah mengalokasikan belanja modal yang berbentuk aset tetap (contohnya: peralatan dan berbagai sarana prasarana penunjang penting) dalam rangka memaksimalkan produktivitas di sektor perekonomian, maka dibutuhkan belanja modal yang besar. Saragih (2003) dalam Febriana dan Praptoyo (2015) menyebutkan jika penggunaan anggaran belanja seharusnya dapat dialokasikan ke dalam berbagai hal meningkatkan produktivitas (misalnya: aktivitas yang membangun daerah). Pemerintah hendaknya dapat memperbanyak penerimaan dari berbagai program pada pelayanan publik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa alokasi belanja daerah sangat berperan penting bagi kepentingan masyarakat luas di daerah tersebut.

Walaupun demikian, pada penelitian (2016) menyimpulkan jika di 35 kabupaten/kota pada tahun 2015 memiliki rata-rata tren belanja modal terhadap belanja daerah sebesar 19% dan pada tahun 2016 rata-ratanya sebesar 21%. Hal tersebut berarti bahwa masih jauhnya belanja modal yang dialokasikan dari pada belanja pegawai.

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara positif dengan besarnya nilai proporsi belanja modal atas belanja daerah. Sebaliknya, bila angka rasionalnya rendah dapat mengakibatkan pengaruh buruk atas pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Jumlah belanja modal yang tinggi oleh suatu pemerintah daerah dapat berdampak positif bagi tumbuh kembangnya perekonomian di suatu daerah. Keadaan tersebut dapat menambah peluang penerimaan baru bagi suatu daerah

sebab adanya pengaruh yang signifikan atas pertumbuhan ekonomi daerah diluar i sektor luar negeri, rumah tangga, dan swasta (Kemenkeu, 2014).

Penyusunan anggaran pada praktiknya adalah saran yang diutarakan pihak eksekutif yang hanya mengutamakan kepentingan eksekutif saja (Darwanto dan Yustikasari dalam Sugiyanta, 2016). Anggaran yang diajukan oleh pihak eksekutif akan meningkatkan segi finansial ataupun non finansial *agency*-nya. Sementara Darwanto dan Yustikasari (dalam Sugiyanta, 2016) menyimpulkan jika penggunaan anggaran oleh legislatif dapat mencukupi *self-interest*-nya. Artinya, anggaran belanja daerah banyak untuk belanja yang lainnya dan bukan dipergunakan untuk belanja modal.

Otonomi daerah memiliki implikasi yang lain yaitu belanja rutin daerah memerlukan dana yang dialokasikan dari pemerintah daerah untuk kegiatan perbendaharaan negara. Oleh sebab itu, dana yang besar dibutuhkan untuk mendanai aktivitas tersebut. Pelaporan APBD adalah aktivitas yang terus menerus dilakukan pemerintah daerah secara berkala atas segala bentuk pengeluaran kas daerah yang digunakan dalam pembiayaan operasional pemerintahan. Meningkatnya kebutuhan daerah akan memperbesar kebutuhan dana yang harus dimiliki pemerintah. Bila kebutuhan belanja pemerintah terpenuhi dapat menimbulkan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ini merupakan dasar bagi kesuksesan terealisasinya otonomi daerah yang dipengaruhi oleh APBD yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya. Otonomi daerah juga bergantung terhadap realisasi pendapatan dan belanja daerah serta berbagai sumber pendapatan daerah yang lain (dalam Sugiyanta, 2016).

Terkait dengan hal itu, terdapat relevansi dan tingkat urgensi pada jajaran pemerintah daerah sendiri. Pelayanan publik yang diberikan pemerintah akan berkorelasi positif dengan dampak dari anggaran yang menunjang fungsi dan kinerja pemerintah sehingga diperlukan pengawasan oleh DPRD agar tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan ini merupakan bentuk yang sesuai dengan *agency theory*, dimana DPRD berperan selaku prinsipal dan pemerintah daerah berperan selaku agen.

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari pemungutan retribusi daerah, pajak daerah, hasil dikelolanya kekayaan daerah yang terpisah, dan PAD sah lainnya dengan tujuan memberi kebebasan kepada daerah sebagai wujud asas desentralisasi untuk melakukan penggalan bagi pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah.

PAD ini sangat berperan sebagai penopang utama pendanaan operasional pembangunan di daerah dan upaya yang dilakukan daerah untuk mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat dalam memperoleh dana bantuan. Upaya tersebut dapat menambah ketersediaan dana di daerah yang sifatnya mandiri untuk segala kegiatan pembangunan daerah. Namun, kontribusi berbagai sumber PAD yang belum signifikan menjadi permasalahan yang umumnya terjadi. Hal ini dikarenakan kemampuan pengawasan dan perencanaan keuangan yang lemah sehingga muncul sejumlah kebocoran anggaran di daerah yang cukup besar (Halim, 2007).

Sumber dana bagi pemerintah daerah selain PAD yaitu dana alokasi yang ditransferkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat akan mentransfer sejumlah

dana bagi penyelenggaraan wewenang di Daerah yaitu berupa DBH (Dana Bagi Hasil), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan DAU (Dana Alokasi Umum), (UU No. 32/2004).

Pada UU No. 33/2004, disebutkan jika DAU dan DAK berasal dari dana alokasi pendapatan APBN untuk mendanai kebutuhan Daerah atau untuk pemeratakan kemampuan finansial antar daerah sebagai wujud dilaksanakannya desentralisasi. Secara leluasa, pemerintah daerah dapat mempergunakan DAU ini dalam rangka mewujudkan pemerataan berdasar pada kebutuhan nyata dan potensi fiskal yang telah dipertimbangkan oleh setiap daerah sehingga mampu mengurangi munculnya kesenjangan antar daerah saat masyarakat menerima pelayanan yang baik dari pemerintah daerah.

Sumber anggaran yang lain selain DAK, DAU, dan PAD yaitu SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) adalah hasil selisih antara defisit/surplus anggaran terhadap pendanaan netto. Angka SILPA ini dalam penyusunan APBD seharusnya bernilai nol. Yang berarti bahwa pembiayaan yang diterima harus bisa menghilangkan defisit anggaran. Bila bernilai positif artinya terdapat sisa dari pembiayaan netto yang dikurangi defisit anggaran. Dengan kata lain, masih ada cadangan dana yang belum digunakan untuk dibelanjakan oleh daerah atau dikeluarkan dalam membiayai daerah. Anggaran yang tersisa itu kemudian dipergunakan pada tahun selanjutnya sebagai sumber anggaran.

Belanja modal juga sering dikaitkan terhadap pertumbuhan ekonomi selain APBD, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses naiknya *output* per kapita (Mardiasmo, 2002). Secara teori tradisional, PDRB (Produk Domestik Regional

Bruto) dapat ditingkatkan melalui pertumbuhan ekonomi (Adyatma, 2016). PDB (Produk Domestik Bruto) adalah suatu nilai terpenting dalam konsep ekonomi karena dapat mengukur jumlah keseluruhan dari nilai barang dan jasa pada suatu negara Sedangkan PDRB dapat mengukur jumlah keseluruhan dari nilai barang dan jasa pada suatu daerah. Seluruh performa perekonomian dapat dilihat dari PDB. Oleh sebab itu, pemerintah daerah sebaiknya dapat melakukan pengelolaan di daerahnya untuk menumbuhkan perekonomian dengan alokasi anggaran belanja daerah kepada belanja modal sehingga dapat meningkatkan pembangunan di segala bidang dan pemerataan pembangunan di daerah

Namun, pada beberapa penelitian tersebut ditemui sejumlah *research gap* sehingga memerlukan penelitian kembali agar diketahui pengaruh antar variabel yang sebenarnya. Hasil penelitian memperlihatkan jika mayoritas variabel untuk memprediksi belanja modal (SILPA, DAK, DAU, dan PAD) masih mempunyai hasil yang tidak konsisten. Keadaan tersebut memberikan gambaran jika terdapat perbedaan pada periode penelitian, pemilihan lokasi wilayah dan variabel penelitian.

Pengembangan pada penelitian ini mempergunakan beberapa kombinasi variabel yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini, model digunakan yaitu pengaruh PAD, DAU, DAK, SILPA dan Pertumbuhan Ekonomi atas alokasi Belanja Modal.

Objek penelitian ini berada di Jawa Tengah, pertimbangannya yaitu wilayah Jawa Tengah sangat dekat dengan pemerintahan pusat sehingga mudahnya pengawasan yang dilakukan atas DAU sebagai alokasi dana

perimbangan. Disamping itu, provinsi Jawa Tengah masih memperlihatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi dari pada Jawa Timur dan Jawa Barat (BPS, 2016), sehingga pertanyaan mengenai pengaruh PAD,DAU,SILPA dan pertumbuhan ekonomi atas belanja modal layak untuk dianalisis dengan lebih detail.

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 daerah dimana masih terdapat perbedaan (disparitas) pendapatan antar daerah yang relatif tinggi sehingga kemungkinan besar terjadinya ketidaksamaan kondisi antar daerahnya. Selain itu, potensi daerah yang berbeda juga memberi alokasi dana keseimbangan berupa DAU yang berbeda pula besaran nominalnya sehingga peneliti tertarik untuk melakukan pengujian pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan DAU serta SILPA terhadap belanja daerah di Jawa Tengah.

Berdasar pada paparan di atas maka judul penelitian ini adalah “PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, SILPA dan PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL DI JAWA TENGAH TAHUN 2012-2014”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang masalah, fenomena, dan gap penelitian terdahulu maka penelitian ini mempergunakan variabel-variabel berikut: Pertumbuhan Ekonomi, PAD,DAU,SILPA dan Belanja Daerah. Adapun rumusan masalah yang ingin diteliti lebih lanjut adalah :

- 1) Apakah PAD mempengaruhi secara positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal Provinsi Jawa Tengah ?

- 2) Apakah DAU mempengaruhi secara positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal Provinsi Jawa Tengah ?
- 3) Apakah SILPA mempengaruhi secara positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal Provinsi Jawa Tengah ?
- 4) Apakah pertumbuhan ekonomi mempengaruhi secara positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal Provinsi Jawa Tengah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris:

- 1) Pengaruh PAD terhadap pengalokasian anggaran belanja modal Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Pengaruh DAU terhadap pengalokasian anggaran belanja modal Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Pengaruh SILPA terhadap pengalokasian anggaran belanja modal Provinsi Jawa Tengah.
- 4) Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal Provinsi Jawa Tengah.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat diambil bagi semua pihak yang berkepentingan. Hasil manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Pengembangan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pemerintah.

2. Pengembangan praktik

- a. Dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam hal peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi para peneliti agar dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti baik dalam hal penelitian maupun objek penelitian, dalam hal ini adalah kualitas penelitiannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Teori Agensi (Agency Theory)

Terkait dengan teori agensi (*Agency Theory*) ada dua pihak yang terlibat dalam kesepakatan, mereka adalah pihak yang memberikan kewenangan dan pihak yang diberi atau menerima kewenangan. Pihak yang memberikan kewenangan disebut dengan *principal*, sedangkan pihak yang diberi kewenangan disebut dengan *agen*. Zimmerman (1997) mengatakan bahwa masalah keagenan muncul ketika pihak pemberi wewenang mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada pihak agen. Hubungan antara dua pihak tersebut memunculkan sebuah permasalahan, yaitu adanya informasi asimetris, yang mana salah satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak daripada pihak yang lain. Selain itu Zimmerman (1997) juga menambahkan bahwa masalah keagenan sering terjadi di semua organisasi. Pada organisasi sektor pemerintahan, masalah agensi terjadi antara pejabat pemerintah yang dipilih sebagai *principal* dengan masyarakat sebagai agen. Pejabat pemerintah sebagai pihak *principal* mempunyai lebih banyak informasi sehingga mereka dapat membuat kebijakan yang kebanyakan hanya mementingkan pemerintah dan orang-orang yang memiliki kekuasaan dan sering mengabaikan kepentingan masyarakat. Untuk mengurangi bahkan menghindari masalah tersebut, pemerintah harus berupaya untuk menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel.

Keterkaitan teori keagenan (*agency theory*) dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan dan juga hubungan antara masyarakat yang diprosikan oleh DPRD (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen). Pemerintah pusat mendelegasikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengelola rumah tangga daerahnya sendiri. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari pendelegasian wewenang tersebut, pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan yang tujuannya adalah membantu pemerintah daerah, baik dalam mendanai kebutuhan pemerintahan sehari-hari maupun dalam memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Disamping itu, teori keagenan juga tersirat dalam hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat. Masyarakat sebagai prinsipal telah memberikan sumber daya kepada daerah berupa pembayaran pajak daerah, retribusi dan sebagainya untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah selaku agen dalam hal ini, sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai, yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri.

2.1.1. Desentralisasi fiskal di Indonesia

Pada UU No.32/2004, disebutkan jika desentralisasi adalah diserahkannya kewenangan pemerintahan pusat kepada daerah yang otonom untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri dalam sistem NKRI. Tujuan atas dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi yaitu untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat sehingga pemerintah dapat melayani masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Hal ini berdasar pada asumsi jika adanya aspek

pemahaman yang lebih baik dari pemerintah daerah atas aspirasi dan kebutuhan masyarakatnya dibandingkan dengan pemerintah pusat.

Desentralisasi memfokuskan diri terhadap posisi kabupaten dan kota dalam pemerintahan sebab keduanya ada pada peringkat ketiga setelah pemerintah pusat dan provinsi. Sejumlah peneliti memberikan sarana jika pelaksanaan desentralisasi seharusnya di tingkat provinsi sebab lebih besarnya kapasitas yang dimiliki provinsi dalam menangani seluruh pelimpahan tanggung jawab dibandingkan kabupaten/kota. Meskipun begitu, secara politis pemerintah pusat akan tidak diuntungkan bila pemerintahan otonom di provinsi yang kuat harus dibentuk oleh pusat. Ini dapat menyebabkan semakin kuatnya disintegrasi bangsa (Arsyad,2004).

Pada UU No. 32/2004 pasal 14, Kabupaten/Kota memiliki sejumlah wewenang yang menjadi urusan wajib bagi daerah yang bersangkutan, yaitu:

- a. Pengendalian dan perencanaan pembangunan;
- b. Pengawasan, pemanfaatan dan perencanaan tata ruang;
- c. Pelaksanaan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
- d. Pemberian jaminan atas adanya fasilitas umum;
- e. Perbaikan dibidang kesehatan;
- f. Pelaksanaan pendidikan yang baik;
- g. Penanganan permasalahan sosial;
- h. Pemberian layanan dibidang ketenagakerjaan;
- i. Pemberian fasilitas untuk mengembangkan usaha menengah, kecil dan koperasi;
- j. Penanggulangan lingkungan hidup;

- k. Pemberian layanan pertanahan;
- l. Pemberian layanan catatan sipil dan kependudukan;
- m. Pemberian layanan administrasi umum pemerintahan;
- n. Pemberian layanan administrasi penanaman modal;
- o. Pelaksanaan layanan dasar yang lain; dan
- p. Urusan wajib yang lain yang telah diatur oleh undang-undang.

Pemerintahan kabupaten/kota memiliki urusan yang sifatnya pilihan yaitu urusan pemerintahan yang riil dan memiliki potensi dalam meningkatkan kesejahteraan publik sesuai dengan potensi unggulan, kekhasan, dan kondisi daerah terkait.

Pada dasarnya, ada 3 prinsip yang terkait dengan implementasi otonomi daerah di Indonesia, yaitu:

- 1) Desentralisasi, merupakan diserahkannya kewenangan pusat kepada kabupaten/kota yang menyebabkan otonomi lebih menitikberatkan terhadap daerah terkait.
- 2) Dekonsentrasi merupakan dilimpahkannya kewenangan pemerintahan kepada Gubernur selaku perwakilan dari pemerintah dan/atau kepada instansi ditingkat atasnya pada daerah tertentu.
- 3) Tugas pembantuan, merupakan tugas yang diberikan dari pemerintah provinsi kepada desa dan dari kabupaten/kota ke desa untuk suatu tugas tertentu.

2.1.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pemerintahan daerah pada prinsipnya ditujukan untuk memberdayakan keikutsertaan masyarakat dan pemerintah dalam membangun wilayahnya.

Mardiasmo (2004) mengemukakan jika pelaksanaan otonomi daerah memiliki tujuan utama yaitu untuk memajukan perekonomian dan memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat daerah.

Keuangan Negara yang diatur dalam UU No.17/2003 Pasal 16 menyebutkan jika:

- 1) APBD adalah bentuk atas dikelolanya keuangan daerah setiap tahun yang yang ditetapkan oleh peraturan Daerah.
- 2) APBD meliputi Anggaran Pembiayaan, Anggaran Belanja, dan Pendapatan.
- 3) Pendapatan Daerah bersumber pada PAD.
- 4) Belanja Daerah dapat dijabarkan menurut jenis, fungsi, dan organisasi belanja.

Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Permendagri No.32/2008 menjelaskan jika APBD merupakan perencanaan keuangan pemerintahan daerah tiap tahun yang dikaji dan disetujui bersama-sama antara DPRD dan pemerintah daerah, dan penetapannya melalui peraturan daerah. Pada Pasal 22 ayat 1 Permendagri No.13/2006 disebutkan jika struktur APBD adalah suatu kesatuan yang mencakup: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

APBD adalah perencanaan atas kerja pemerintah daerah yang berbentuk uang (rupiah) dalam periode tertentu (satu tahun) dan menjadi instrumen utama penentuan keputusan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di daerah (Halim, 2007). Anggaran daerah berguna untuk menentukan besaran nilai pengeluaran dan pendapatan, sebagai media koordinasi

semua kegiatan dari berbagai unit kerja, memotivasi para pegawai, sumber untuk mengembangkan berbagai ukuran standar yang dapat dievaluasi, rencana pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa depan, dan membantu atas diambilnya suatu keputusan. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan pemakaian sumber daya ekonomi, alokasi, dan ikhtisar sumber yang dikelola pemerintah pusat/daerah yang mencerminkan suatu perbandingan antara anggaran dan realisasi pada satu periode tertentu (Erlina, 2008).

Pertanggungjawaban keuangan daerah adalah bentuk tanggung jawab dari kepala daerah atas penyelenggaraan APBD seperti diatur pada UU No.17/2003 dan PP No.58/2005. Pada pasal 6 UU No.17/2003, menyebutkan jika presiden sebagai kepala pemerintahan pemegang kekuasaan atas dikelolanya keuangan negara yang menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah tersebut meliputi penyerahan kepada kepala pemerintahan daerah (bupati) dan juga menjadi wakil dalam pemisahan kepemilikan kekayaan daerah. Penyusunan anggaran membutuhkan kerja sama dari setiap pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Secara struktural, SKPD bertanggung jawab untuk setiap anggaran yang terlaksana dan pengelolaan atas masing-masing elemen anggaran.

Pengguna Anggaran (Kepala SKPD) bertanggung jawab menyusun Laporan Keuangan pelaksanaan APBD pada setiap SKPD. Kemudian laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah atau PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah). PPKD kemudian menyampaikan kepada walikota/bupati/gubernur untuk memenuhi tanggung jawab atas penyelenggaraan

APBD. Berikutnya, LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) diteruskan kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) paling lambat 3 bulan setelah periode anggaran berakhir.

Teori tradisional keuangan publik sangat berperan besar terhadap desentralisasi fiskal. Elemen dasar pemerintah daerah bagi sumber-sumber penerimaan daerah antara lain: 1) Pemda memberi pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik. 2) Pemda menyediakan layanan umum yang disesuaikan dengan kebutuhan khalayak luas. 3) Pemda mempergunakan anggaran untuk menyediakan layanan umum yang efisien. Dan 4) Desentralisasi memberi dorongan terhadap inovasi bagi kebijakan publik.

Sejak abad ke-17 dan ke-18, dunia sudah mengenal Teori desentralisasi fiskal. Pemerintah pusat tidak sepenuhnya mempercayai jika demokratis dalam pemerintahan adalah harapan utama sebagai pelindung kebebasan manusia. Ada 2 hal yang mendukung pemerintah dalam pelaksanaan desentralisasi yaitu nilai pemerintahan dan nilai efisiensi. Kesejahteraan sosial dapat dicapai dengan efisiensi yang maksimal.

Saat menentukan permintaan dan penawaran, sektor publik tidak menetapkan nilai yang sama seperti sektor swasta. Barang dan jasa pada sektor publik telah dijadikan politik, tetapi pelayanan pajak sebisa mungkin harus mampu menggambarkan kumpulan preferensi dari masyarakat. Pemerintahan harus mampu menentukan keputusan, akuntabilitas, dan responsif atas berbagai kebutuhan dan masalah daerah. Pemilu daerah yang menggambarkan bentuk

akuntabilitas dapat mendorong alokasi daerah, sedangkan pemilu ditingkat pusat jarang berfokus pada ketersediaan pelayanan di daerah.

Desentralisasi fiskal merupakan diteruskannya kewenangan pemerintah pusat kepada daerah yang mempunyai fungsi-fungsi khusus yang berhubungan dengan pendapatan fiskal dan kewenangan administratif. Para pakar ekonomi mayoritas hanya memfokuskan diri pada ekuitas dan efisiensi, sedangkan administrasi publik hanya memfokuskan diri pada akuntabilitas dan kekuasaan. Setiap program yang dicanangkan daerah wajib dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat. Keputusan legislatif pusat menjadi penentu output daerah dengan sistem terpusat.

Kesejahteraan dapat diciptakan dengan desentralisasi fiskal dimana bervariasi biaya dan tuntutan terhadap ketersediaan layanan publik dapat membuat tingkat efisien pada output yang berbeda. Kesejahteraan dapat diukur melalui desentralisasi fiskal yaitu meningkatkan jumlah surplus dari pelayanan public yang tersedia dengan baik.

Desentralisasi fiskal dibentuk dengan alasan untuk pembangunan kapasitas daerah sehingga adanya tanggung jawab yang harus diberikan kepada pemerintah pusat. Pembangunan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat dengan saling membantu. Tuntutan otonomi yang lebih besar dari pemimpin daerah untuk menguasai sektor pajak menjadi tanggung jawab bersama. Pembangunan akuntabilitas pada belanja daerah, pemda harus mampu mengendalikan sendiri pendapatan yang menjadi sumber penerimaan sehingga dapat mencukupi segala kebutuhan daerah yang layak untuk dipertimbangkan.

Kesepakatan antara legislatif dan eksekutif untuk menyusun APBD terlebih dahulu direncanakan pedomannya berupa Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran. Rancangan APBD dibuat oleh eksekutif untuk dipelajari oleh legislatif dan kemudian dilakukan pembahasan bersama sebelum Peraturan Daerah ditetapkan. Dari sudut pandang keagenan, ini termasuk dalam bentuk kontrak (*incomplete contract*) yang digunakan sebagai media dalam melakukan pengawasan anggaran oleh eksekutif.

Sumber daya yang dialokasikan dalam *capital expenditure* (belanja modal) adalah proses yang penuh dengan berbagai kepentingan politik. Anggaran tersebut seharusnya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan publik berupa pemberian fasilitas umum kepada masyarakat secara cuma-cuma oleh pemda. Akan tetapi, terdapatnya politik yang menjadi kepentingan legislatif dalam proses penyusunan anggaran mengakibatkan terdistorsinya alokasi belanja modal dan tidak efektifnya solusi dari masalah yang ada di masyarakat (Keefer dan Khemani, 2003). Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, perencanaan keuangan jangka panjang selalu dihubungkan dengan anggaran belanja modal khususnya pendanaan untuk memelihara aset tetap dari hasil belanja modal. Konsep MTEF (*Multi-Term Expenditure Framework*) menjelaskan jika kebijakan belanja modal seharusnya dapat mempertimbangkan *usefulness* (kemanfaatan) dan *budget capability* (kemampuan keuangan pemerintah daerah) saat mengelola aset jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2001). Sesuai tujuan otonomi daerah dan peraturan APBD, Anggaran Daerah merupakan media dalam melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, maka kerangka ekonomi harus dapat digambarkan oleh APBD sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya sebagai pemecahan masalah dan peningkatan kesejahteraan umum.

2.1.3. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan anggaran yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap dan aset lain yang bermanfaat di atas satu periode akuntansi. Belanja modal ini terdiri dari bangunan, gedung, tanah, aset tak berwujud, dan peralatan yang didapat dari hasil membelanjakan modal (PP No. 24/2005). Dengan kata lain, kegiatan belanja modal dapat menambah aset tetap/inventaris atau membentuk modal yang bermanfaat di atas satu periode akuntansi, khususnya biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas aset, menambah masa manfaat, dan memelihara/mempertahankan aset yang ada. Belanja Modal terdiri dari 5 jenis yaitu:

1) **Belanja Modal Tanah**

Belanja Modal Tanah yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan sertifikat, pematangan tanah, perataan, penimbunan, pengosongan, sewa dan balik nama tanah, penyelesaian/pembebasan/pembelian/pengadaan tanah dan biaya yang lain terkait dengan hak atas tanah yang diperoleh hingga tanah siap pakai.

2) **Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu biaya yang dikeluarkan untuk peningkatan kapasitas, penggantian/penambahan/pengadaan peralatan dan mesin dan inventaris kantor dengan manfaat di atas 1 tahun hingga peralatan dan mesin siap pakai.

3) **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan pembangunan, pengawasan, perencanaan, penggantian/

penambahan/pengadaan bangunan dan gedung yang sifatnya meningkatkan kapasitas bangunan dan gedung hingga siap pakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan, pengawasan, perencanaan, perawatan, pembuatan/pembangunan, penggantian/penambahan/pengadaan jaringan, irigasi dan jalan dan jaringan yang sifatnya meningkatkan kapasitas bangunan dan jaringan, irigasi dan jalan hingga siap pakai

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya Jaringan yaitu biaya yang dikeluarkan untuk perawatan, pembuatan, peningkatan, penggantian, penambahan, dan pengadaan fisik lainnya yang tidak dapat dimasukkan ke dalam 4 kategori di atas, yang dapat dimasukkan ke dalam kategori ini yaitu belanja modal jurnal ilmiah, buku-buku, tanaman dan hewan ternak, barang museum dan purbakala, barang-barang seni, dan kontrak sewa beli.

Belanja modal adalah belanja memberikan manfaat di atas satu periode akuntansi dan dapat meningkatkan aset/kekayaan daerah yang sifatnya rutin (contohnya: biaya untuk pemeliharaan). Karakteristik spesifik dari belanja modal adalah terdapatnya berbagai pertimbangan dalam proses alokasinya (Halim, 2004).

Kepemilikan aset tetap menjadi akibat dari belanja modal adalah syarat pokok pemerintah daerah dalam memberi pelayanan kepada publik. Aset tetap dapat ditambah melalui alokasi dana dalam APBD. Hal ini berdasar pada apa yang dibutuhkan oleh daerah berupa fasilitas, baik untuk menunjang kinerja pemerintah ataupun untuk masyarakat. Setiap tahun pemerintah selalu melakukan

pengadaan aset tetap yang disesuaikan dengan prioritas pelayanan dan anggaran yang berdampak mampu bertahan dalam waktu lama secara finansial (Syukriy Abdullah, Abdul Halim : 2006).

Tujuan dari belanja modal adalah cara yang dilakukan pemerintah daerah untuk memperoleh aset tetap seperti infrastruktur, bangunan, peralatan dan harta tetap yang lain. Secara teoretis, cara untuk mendapatkan aset tetap adalah dengan membeli, ditukar dengan aset lainnya, dan membangunnya sendiri Tetapi pada kasus-kasus yang terjadi di pemerintah daerah umumnya dilakukan dengan membeli. Pemerintah memberlakukan tender atau lelang untuk memproses pembelian.

Penerimaan PAD dapat dioptimalkan melalui usaha yang dilakukan oleh pemda dengan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik. PAD yang dieksploitasi secara berlebihan dapat membebani publik, daerah menjadi disinsentif dan perekonomian makro akan terancam (Mardiasmo, 2002). Perda-perda baru (khususnya pajak dan retribusi) menjadi tidak efektif karena pada tahun 2001 tidak terdapat korelasi positif antara kesungguhan pemda dengan berbagai pungutan baru untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik, walaupun berwenang untuk melakukan *charge* (pemungutan) berupa pajak dan retribusi, wewenang seharusnya dapat dipertimbangkan *cost and benefit* (untung-ruginya), contohnya sat menentukan tarif atas pelayanan publik. Ketidakmauan masyarakat melakukan pembayaran pajak/retribusi dapat dikarenakan kualitas pelayanan publik yang buruk. Akibatnya, adanya respon negatif dari produk yang seharusnya dapat dijual (Mardiasmo, 2002).

Berbagai alokasi belanja yang diprogramkan oleh pemerintah, sebaiknya dapat bermanfaat bagi masyarakat secara langsung. Ini mengharuskan adanya relevansi antara pungutan yang sifatnya retribusi dibandingkan pajak untuk kepentingan jangka pendek.. Alasan tersebut menjadi dasar dalam hubungan pungutan dengan masyarakat secara langsung. Bila kuantitas dan kualitas pelayanan publik tidak meningkat maka masyarakat tidak akan mau membayar pungutan tersebut (Mardiasmo, 2002).

2.1.4. Pendapatan Asli Daerah

Terlaksananya desentralisasi fiskal adalah salah satu bentuk diberikannya berbagai sumber penerimaan daerah untuk digunakan dan digali sendiri yang disesuaikan dengan potensi setiap daerah. *Lokal taxing power* dapat dicerminkan melalui PAD yang hanya sebagai keadaan yang kondusif untuk mewujudkan otonomi daerah yang lebih luas sebab proporsi dan nilainya telah mencukupi secara penuh guna dijadikan dana bagi daerah (Simanjuntak, 2005). Secara teoretis, kemandirian daerah dapat dihitung dari PAD. PAD ini bersumber dari perolehan pajak daerah, perolehan retribusi, perolehan BUMD, perolehan kekayaan daerah lainnya yang dikelola terpisah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah (UU No. 32/2004 Pasal 157 dan UU No. 33/2004 pasal 6).

Pada UU No. 33/2004 pasal 1, PAD didefinisikan sebagai perolehan yang diterima oleh daerah dari berbagai sumber di daerahnya sendiri yang dipungut berdasar pada perda sesuai dengan peraturan yang berlaku. PAD juga dapat diartikan sebagai sumber pendapatan daerah yang hanya dieksploitasi dari suatu daerah yang dipergunakan sebagai modal awal bagi pemda untuk mendanai berbagai usaha dan pembangunan daerah guna meminimalkan ketergantungan dana dari pusat.

PAD seperti pada pasal 3(a) UU No. 25/1999 menyebutkan jika PAD merupakan bentuk dari perolehan pendapatan berbagai sumber yang ada daerahnya sendiri dan dipungut berdasar pada perda yang berlaku. Berdasar pada beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan jika PAD merupakan sejumlah penerimaan nilai berupa uang dari berbagai sumber dan masyarakat wilayahnya sendiri selama periode anggaran untuk mendanai masing-masing pengeluaran rutin dan penggunaan sisa anggaran untuk membiayai pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Halim (2007), PAD dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori yaitu::

a. Pajak Daerah.

Pada UU No.34/2000, pendapatan pajak kabupaten/kota mencakup:

- 1) Pajak Parkir
- 2) Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- 3) Pajak penerangan jalan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak hiburan
- 6) Pajak restoran
- 7) Pajak hotel

b. Retribusi Daerah.

Retribusi daerah adalah pendapatan daerah dari pemungutan retribusi. UU No.34/2000 pendapatan retribusi kabupaten/kota terdiri dari 29 objek pendapatan.

c. Perolehan kekayaan milik daerah yang dikelola terpisah.

Perolehan kekayaan milik daerah yang dikelola terpisah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari kekayaan daerah yang dikelola secara terpisah. Objek pendapatan ini menjadi dasar pengelompokannya yaitu:

- 1) Bagian laba atas disertakannya modal BUMN.
- 2) Bagian laba atas disertakannya modal BUMD.
- 3) Bagian laba atas disertakannya modal swasta/kelompok usaha.

d. PAD Lain-lain yang sah.

PAD Lain-lain yang sah adalah bentuk dari pendapatan daerah dari milik Pemda yang lain. Penerimaan ini dilakukan melalui rekening khusus. Objek pendapatan dapat dikelompokkan kedalam jenis berikut:

- 1) Pendapatan dari cicilan/angsuran penjualan
- 2) Pendapatan dari penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan
- 3) Fasilitas umum dan sosial
- 4) Pendapatan dari pengembalian
- 5) Pendapatan jaminan yang eksekusi
- 6) Pendapatan denda retribusi
- 7) Pendapatan denda pajak
- 8) Pendapatan denda atas terlambatnya pengerjaan suatu proyek
- 9) Penerimaan keuangan dari selisih nilai kurs rupiah terhadap kurs asing
- 10) Penerimaan potongan, komisi, atau bentuk yang lain sebagai akibat terjualnya pengadaan barang dan jasa oleh daerah
- 11) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi pada daerah
- 12) Pendapatan bunga
- 13) Jasa giro

14) Perolehan penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.

Secara konseptual, pendapatan yang berubah dapat mempengaruhi pembelanjaan, tetapi seluruh tambahan pendapatan tersebut tidak selalu dialokasikan untuk pembelanjaan. Abdullah dan Halim (2004) mengemukakan jika PAD dan dana perimbangan sebagai sumber pendapatan daerah dapat mempengaruhi pembelanjaan daerah secara menyeluruh. Walaupun, PAD memiliki proporsi yang maksimal sebesar 10% dari total pendapatan daerah, alokasi anggarannya berkontribusi cukup besar, khususnya jika dihubungkan dengan kepentingan politik.

2.1.5. Dana Alokasi Umum

Pada UU Nomor 25/1999, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus adalah bagian provisi yang berbentuk dana yang ditransfer antar pemerintah dari pusat ke kabupaten/kota. DAU yaitu transfer yang sifatnya umum yang diperuntukkan bagi seluruh kabupaten/kota untuk pengisi kesenjangan antara kebutuhan fiskal dan kapasitasnya dan disalurkan melalui perumusan tertentu berdasar pada sejumlah prinsip umum dan mengindikasikan jika suatu daerah terbelakang dan miskin harus menerima dana yang lebih besar dibandingkan daerah yang kaya. Dengan kata lain, alokasi DAU bertujuan sebagai alat untuk pemeratakan kemampuan menyediakan layanan publik di berbagai daerah (Kuncoro, 2004).

DAU juga dapat diartikan sebagai dana alokasi dari APBN untuk pemeratakan keuangan di berbagai daerah guna mendanai berbagai kebutuhan yang dikeluarkan dalam melaksanakan desentralisasi. Terkait dengan

perimbangan keuangan daerah dan pusat, ini termasuk ke dalam konsekuensi logis dari diserahkan wewenang pusat kepada daerah. Dengan begitu, transfer yang dilakukan oleh pemerintah cukup signifikan dalam APBN dan pemda dapat dengan bebas mempergunakan dana yang diperoleh. Dana tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki pelayanan publik yang ada atau dapat digunakan untuk kebutuhan yang tidak penting lainnya.

DAU adalah alat yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk pemeratakan pembangunan supaya ketimpangan yang terjadi menjadi berkurang terkait dengan penguasaan pajak dan kebutuhan pembiayaan antara Pusat dan Daerah. Hal tersebut mampu ditangani dengan keseimbangan keuangan dengan total dana yang didapat paling sedikit sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri. DAU dapat memberi kepastian pada daerah untuk mendapatkan berbagai sumber pendanaan untuk memenuhi tanggung jawab kebutuhan biaya. Ketentuan seperti ini telah ditentukan melalui prinsip *fiskal gap* yang diatur dalam UU No. 25/1999 disebutkan jika kebutuhan DAU suatu Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) dihitung melalui pendekatan konsep *fiskal gap* yaitu DAU yang dibutuhkan daerah dihitung atas dasar *fiskal needs* (kebutuhan daerah) dan *fiskal capacity* (potensi daerah). Dengan kata lain, DAU dipergunakan untuk menutup gap/celah yang ada sebab kebutuhan daerah akan melampaui potensi pendapatan daerah. Berdasar pada konsep *fiskal gap*, penyaluran DAU kepada daerah dengan kemampuan keuangan yang tinggi akan akan mendapatkan DAU yang lebih kecil dan sebaliknya daerah dengan kemampuan keuangan relatif rendah akan mendapatkan DAU yang besar. Konsep ini dapat mengakibatkan daerah dengan

sumber daya alam yang melimpah akan mendapatkan DAU yang minus. Secara definisi DAU bisa dijelaskan dalam definisi-definisi berikut :

1. Satu dari beberapa komponen alokasi dana perimbangan di APBN, yang berdasarkan pada konsep *fiskal Gap* (kesenjangan/celah fiskal), yaitu selisih antara kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal.
2. Instrumen yang dapat menanggulangi alokasi *horizontal balance* untuk pemeratakan kemampuan finansial antar daerah di mana untuk menggunakannya sepenuhnya ditetapkan daerah
3. *Equalization grant*, yaitu menetralkan kesenjangan kemampuan finansial melalui Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil SDA, dan PAD yang didapat Daerah.

2.1.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

APBN yang diatur UU No. 2/2000 Pasal 1 Ayat 11, disebutkan jika SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yaitu selisih lebih antara realisasi pembiayaan dengan realisasi defisit anggaran. APBN dalam pelaksanaannya bisa mengakibatkan adanya sisa lebih ataupun kurang dalam sebuah pembiayaan anggaran yang kemudian diakumulasikan dalam bentuk saldo anggaran lebih.

Saldo anggaran lebih adalah akumulasi SILPA pada periode anggaran sebelumnya dan periode saat ini sesudah dilakukan tutup buku, yang dikurangi/ditambah dengan koreksi tahun buku. SiLPA didapat dari Defisit/Surplus ditambah dengan realisasi pembiayaan bersih dalam 1 periode laporan. Perolehan saldo anggaran lebih di akhir periode laporan didapat dari saldo anggaran lebih di awal periode laporan ditambahkan dengan SiLPA ditambah/dikurangi koreksi pada tahun buku saldo anggaran lebih dan dikurangi saldo anggaran lebih yang digunakan dalam 1 periode laporan.

2.1.7. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi umumnya memiliki perbedaan dengan definisi pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan serangkaian proses untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat berupa produksi barang dan jasa. Sedangkan kata pembangunan dapat diartikan secara luas. Cakupan proses pembangunan yaitu segala perubahan alokasi dan komposisi produksi sumber daya produksi pada berbagai sektor terkait aktivitas perekonomian, perubahan pola penyaluran pendapatan dan kekayaan di berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan kerangka kelembagaan secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat dimaknai sebagai proses naiknya *output* per kapita yang dilihat dari PDRB per kapita.

Boediono (1992) mengemukakan jika pertumbuhan ekonomi adalah tahap-tahap naiknya *output* untuk jangka waktu yang cukup lama. Indikator pertumbuhan ekonomi yang dapat digunakan umumnya mempunyai rentang waktu yang lama, contohnya 10, 20, 50 tahun atau lebih. Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi bila bersumber pada kekuatan perekonomian itu sendiri.

PDB (produk domestik bruto) adalah suatu ukuran terpenting ekonomi yang mampu menentukan jumlah output nilai barang dan jasa di suatu negara sedangkan PDRB adalah ukuran untuk menghitung jumlah output nilai barang dan jasa di daerah (lokal). PDB dapat dipergunakan untuk berbagai tujuan namun yang utama adalah untuk menghitung keseluruhan kinerja perekonomian di suatu wilayah negara.

Walaupun begitu, pertumbuhan ekonomi adalah ciri utama dalam proses pembangunan. Ini dibutuhkan karena terkait dengan adanya penduduk yang

semakin bertambah yang secara otomatis akan meningkatkan kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Perubahan harga merupakan permasalahan yang masih harus dicari pemecahannya oleh para ekonom saat tolok ukur yang digunakan adalah uang. Contohnya, penggunaan harga pasar sebagai pembeda jenis barang dan jasa (Samuelson, 2004).

Blakely (1994) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyebutkan jika pemerintah berperan penting dalam mempengaruhi pembangunan di daerah. Sejumlah faktor yang berpengaruh antara lain: SDA, SDM, modal sebagai investasi, komunikasi, pasar ekspor, kondisi ekonomi internasional, teknologi transportasi, kewirausahaan, komposisi sektor industri, dukungan pembangunan, kapasitas pemerintah daerah, dan pengeluaran pemerintah. Berdasarkan paparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan tumbuhnya investasi modal baik dari pemerintah ataupun swasta. Inilah yang menjadi penyebab pemerintah lebih leluasa dalam penyusunan anggaran belanja modal.

Pertumbuhan ekonomi merupakan pengukur prestasi perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Faktanya, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan ekonomi fiskal di suatu negara, seperti pertambahan jumlah dan produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, bertambahnya produksi yang sudah ada, dan berbagai perkembangan lainnya.

2.2. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari duplikasi, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Hasil beberapa penelitian terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, secara ringkas hasil penelitian dari peneliti-peneliti terdahulu dapat disajikan berikut ini.

Tabel 2.1.
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Sampel	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1	Alokasi Belanja Modal untuk pelayanan Publik. (Nurhidayati dan Yaya , 2013)	kabupaten/kota yang telah menyusun laporan realisasi anggaran format SAP dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 yang dipublikasikan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah di www.djpk.depkeu.go.id .	V. Independent: 1. Kemandirian 2. Efektivitas 3. Efisiensi 4. DAU 5. DAK 6. SILPA V. Dependent : Belanja Modal	Analisis regresi berganda	Efektivitas anggaran dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap proporsi belanja modal.
2	Faktor Penentu Alokasi Belanja Modal Dalam APBD Pemerintah Provinsi. (Darmayasa dan Suandi , 2014)	23 kabupaten/kota se-Aceh.yang telah menyusun data anggaran perubahan periode 2009-2012	V. Independent: 1. PAD 2. DAU 3. DAK 4. DBH 5. Belanja Pegawai V. Dependent : Belanja Modal	Analisis regresi berganda	Menunjukkan bahwa: DAU, DBH, berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal PAD, DAK dan belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal
3	Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal pada provinsi Jawa Timur (Febriana dan Praptoyo , 2015)	Sampel penelitian terdiri atas 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur dengan periode penelitian sebanyak tiga tahun yaitu tahun	V. Independent: 1. PAD 2. DAU 3. DAK 4. SILPA V. Dependent : Belanja Modal	Analisis regresi berganda	(1)Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM), (2) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja

No	Judul	Sampel	Variabel	Alat Analisis	Hasil
		anggaran 2012-2014.			Modal, (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, (4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
4	Analisis Determinan Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2013 (Andriani dan Yuliana, 2016)	32 provinsi di Indonesia pada tahun 2010-2013.	V. Independent: 1. PAD 2. Dana 3. Perimbangan 4. (DAU, DAK, DBH) 5. SILPA V. Dependent : Belanja Modal	analisis regresi data panel	PAD, DBH, dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap belanja modal 32 provinsi di Indonesia. Sedangkan DAU dan DAK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal 32 provinsi di Indonesia.
5	Pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD), dana Alokasi Umum (DAU), dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa :Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2015 (Adyatma dan Dirgantari, 2017)	realisasi APBD Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tahun 2013-2015.	V. Independent: 1. PAD 2. DAU 3. DAK 4. SILPA V. Dependent : Belanja Modal	Analisis regresi berganda	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.
6	Analisis Belanja Modal dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya pada pemerintahan kabupaten/Kota di	459 kabupaten/kota dengan data series 3 tahun di pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk rentang periode penelitian	V. Independent : 1.Kemandirian 2. DAU 3. DAK 4. DBH 5.Belanja Pegawai 6. SILPA	analisis regresi dengan data panel	DAK dan Silpa yang mempunyai pengaruh signifikan pada arah positif. Tiga variabel lainnya yaitu DAU, DBH, dan belanja pegawai signifikan ke arah

No	Judul	Sampel	Variabel	Alat Analisis	Hasil
	Indonesia (Sugiyanta , 2016)	adalah 2011-2013	V. Dependent : Belanja Modal		berlawanan. Sedangkan kemandirian daerah tidak signifikan ke arah berlawanan.
	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi (Adyatma dan Oktaviani , 2015)	35 Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah	V. Independent : 1. PAD 2. DAU V. Moderating PDRB V. Dependent : Belanja Modal	Moderated Regression Analysis.	Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi hubungan dana alokasi umum dengan Belanja Modal.

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

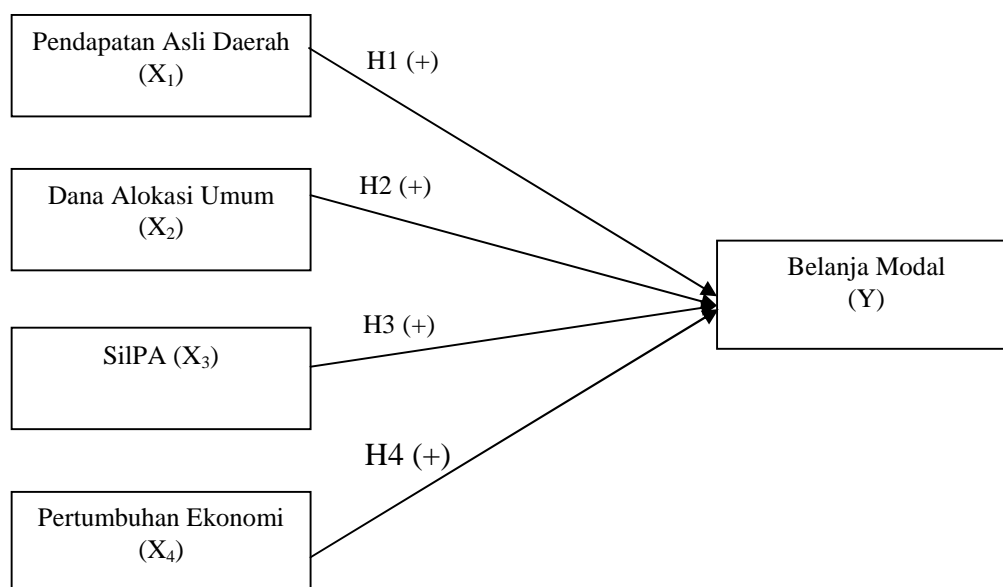
2.3.1. Kerangka Pemikiran Teoritis

Pada UU No.32/2004, disebutkan jika desentralisasi adalah penyerahkannya kewenangan pemerintahan pusat kepada daerah yang otonom untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri dalam sistem NKRI. Tujuan atas dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi yaitu untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat sehingga pemerintah dapat melayani masyarakat secara lebih efektif dan efisien.

Desentralisasi dan otonomi daerah saat ini, diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor, terutama sektor publik. Oleh karena itu, pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang harus dilakukan

pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan meningkatkan belanja modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya. Kebijakan penggunaan sumber pendapatan daerah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.

Berikut ini gambaran skema kerangka pemikiran teoretis penelitian ini:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Teoritis

2.3.2. Pengembangan Hipotesis

2.3.2.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Pada UU No. 33/2004 pasal 1, PAD didefinisikan sebagai perolehan yang diterima oleh daerah dari berbagai sumber di daerahnya sendiri yang dipungut berdasar pada perda sesuai dengan peraturan yang berlaku. PAD juga dapat

diartikan sebagai sumber pendapatan daerah yang hanya dieksploitasi dari suatu daerah yang dipergunakan sebagai modal awal bagi pemda untuk mendanai berbagai usaha dan pembangunan daerah guna meminimalkan ketergantungan dana dari pusat

Secara konseptual, pendapatan yang berubah dapat mempengaruhi pembelanjaan, tetapi seluruh tambahan pendapatan tersebut tidak selalu dialokasikan untuk pembelanjaan. Abdullah dan Halim (2004) mengemukakan jika PAD dan dana perimbangan sebagai sumber pendapatan daerah dapat mempengaruhi pembelanjaan daerah secara menyeluruh. Walaupun, PAD memiliki proporsi yang maksimal sebesar 10% dari total pendapatan daerah, alokasi anggarannya berkontribusi cukup besar, khususnya jika dihubungkan dengan kepentingan politik. Untuk dapat membiayai pembangunan daerah khususnya belanja modal, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pendapatan daerah yaitu dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dengan demikian, diharapkan dengan meningkatkan pendapatan daerah akan dapat meningkatkan belanja modal sehingga pembangunan daerah dapat ditingkatkan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Febriana dan Praptoyo (2015), Andriani dan Yuliana (2016) dan Adyatma dan Dirgantari (2017) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H1 : Terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel pendapatan asli daerah terhadap alokasi anggaran belanja modal di Jawa Tengah.

2.3.2.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan suatu daerah perlu didukung dengan berbagai macam infrastruktur baik sanitasi maupun sebagainya. Akan tetapi terkadang pendapatan asli daerah tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan maka dalam hal ini dibutuhkanlah dana transfer dari pusat berupa DAU. Dana Aloksi Umum yang adalah bagian dari Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah Daerah.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Karena dana alokasi umum berasal dari pemerintah pusat, maka diperlukan transparansi dalam pengalokasian penggunaannya khususnya belanja modal secara efektif dan efisien. Dengan memiliki dana perimbangan maka pemerintah dapat menggunakannya untuk menutupi kebutuhan belanja modal.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Darmayasa dan Suandi (2014), Febriana dan Praptoyo (2015) maupun Adyatma dan Oktaviani (2015) mendapatkan bahwa dana alokasi umum mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis 2 yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H2 : Terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel dana alokasi umum terhadap alokasi anggaran belanja modal di Jawa Tengah

2.3.2.3. Pengaruh SILPA terhadap Belanja Modal

SiLPA tahun sebelumnya adalah pembiayaan yang diterima untuk dipergunakan menutupi anggaran yang defisit bila realisasi penerimaan jauh lebih rendah dibandingkan realisasi belanja, membiayai terlaksananya program lanjutan terhadap beban belanja langsung (belanja pegawai, belanja modal, serta belanja barang dan jasa) dan membiayai kewajiban yang lain hingga akhir tahun anggaran belum terselesaikan. Penelitian sebelumnya menguatkan hal tersebut dimana SiLPA berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Aprizay, Darwanto dan Arfan (2014), Andriani dan Yuliana (2016) dan Sugiyanta (2016) mendapatkan bahwa SILPA mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis 3 yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H3 : Terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel SILPA terhadap alokasi anggaran belanja modal di Jawa Tengah.

2.3.2.4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi adalah tahap-tahap naiknya *output* untuk jangka waktu yang cukup lama. Indikator pertumbuhan ekonomi yang dapat digunakan umumnya mempunyai rentang waktu yang lama, contohnya 10, 20, 50 tahun atau lebih. Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi bila bersumber pada kekuatan perekonomian itu sendiri.

PDB (produk domestik bruto) adalah suatu ukuran terpenting ekonomi yang mampu menentukan jumlah output nilai barang dan jasa di suatu negara

sedangkan PDRB adalah ukuran untuk menghitung jumlah output nilai barang dan jasa di daerah (lokal). PDB dapat dipergunakan untuk berbagai tujuan namun yang utama adalah untuk menghitung keseluruhan kinerja perekonomian di suatu wilayah negara..

Peran pemerintah sangat penting dalam pembangunan daerah. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah yang harus ditangani oleh pemerintah. Sejumlah faktor yang berpengaruh antara lain: SDA, SDM, modal sebagai investasi, komunikasi, pasar ekspor, kondisi ekonomi internasional, teknologi transportasi, kewirausahaan, komposisi sektor industri, dukungan pembangunan, kapasitas pemerintah daerah, dan pengeluaran pemerintah.

Pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Mardiasmo, 2002).

PP No. 58/2005 pasal 26 menyebutkan jika usaha dalam memenuhi kewajiban daerah dapat berbentuk semakin meningkatnya fasilitas umum, fasilitas sosial, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan dasar yang layak serta sistem jaminan sosial yang dikembangkan dengan baik. Namun demikian, pada praktiknya, anggaran yang disusun sebagai usulan para eksekutif akan bermuatan utama bagi kepentingan mereka sendiri (Smith dan Bertozzi, 1998). *Agency* dari eksekutif dapat ditingkatkan dengan pengajuan anggaran, baik finansial ataupun non finansial. Secara implisit, legislatif juga mempergunakan anggaran agar *self-interest*-nya terpenuhi yang menyebabkan eksekutif dan legislatif memiliki

kecenderungan untuk menentukan anggaran yang dialokasikan sebagai belanja modal (Mauro, 1998; Von Hagen, 2002; Keefer dan Khemani, 2003).

Di sisi lain, daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan adanya peningkatan terhadap pelayanan public maupun penyediaan infrastruktur daerah. Namun karena sifat penyediaan fasilitas dan infrastruktur tidak bersifat permanen, maka pemerintah daerah tetap akan memerlukan alokasi dana untuk pengelolaan maupun untuk pemeliharaan infrastruktur tersebut, karena jika anggaran tersebut terabaikan maka bukan tidak mungkin kualitas fasilitas maupun infrastruktur tersebut akan berkurang sehingga dapat menurunkan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode-periode selanjutnya.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis 4 yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H4 : Terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi anggaran belanja modal di Jawa Tengah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan sebenarnya berdasarkan apa yang nampak, biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyajikan data, menganalisis yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian. Jenis penelitian ini mempunyai tujuan menggambarkan efek penetapan metode gross-up sebelum dan sesudah terhadap pajak penghasilan badan untuk penghematan pembayaran pajak berupa perbedaan tingkat pajak yang dilaporkan.

3.2. Variabel Penelitian, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Untuk lebih memperjelas dalam pembahasan penelitian maka diberikan definisi dari variabel-variabel yang digunakan, yaitu :

1. Variabel bebas

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya.

Variabel bebas terdiri dari:

Tabel 3.1. Definisi Operasional variabel bebas

No.	Variabel	Definisi	Ukuran/ Indikator
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Menurut Ahmad Yani (2014) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan	PAD = Total pajak daerah + total retribusi daerah + total hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + lain-lain pendapatan daerah yang sah

		daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	Menurut Halim 2002 Dana lokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.	DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal Di mana, Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal - Kapasitas Fiskal
3	SILPA	Menurut Erlina dan Rasdianto 2013 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih antara realisasi pembiayaan dengan realisasi defisit anggaran yang terjadi.	SiLPA = Surplus/Defisit Realisasi Anggaran + Pembiayaan Neto
4	Pertumbuhan Ekonomi	Menurut Sukirno (1994), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Ukuran yang sering digunakan dalam menghitung pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB).	Pertumbuhan Ekonomi yaitu perkembangan kegiatan ekonomi yang dilihat dari meningkatnya PDRB kabupaten/kota.

2. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah

Tabel 3.2. Definisi Operasional Variabel terikat

No.	Variabel	Definisi	Ukuran/ Indikator
1	Belanja Modal	Menurut Halim (2004), Alokasi anggaran untuk belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan.	Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota.

3.3.2. Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik sampling dengan pertimbangan atau kriteria tertentu (Arikunto, 2002). Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menerbitkan Laporan Realisasi APBD berturut-turut per 31 Desember dari tahun 2012-2014.

2. Memiliki data lengkap yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini secara konsisten. Data-data tersebut meliputi tentang data PDRB,PAD,DAU, SILPA dan Belanja Modal.

Pada situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah disebutkan jika tahun 2012-2014 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang menyampaikan Laporan Realisasi APBD berjumlah 35 Kabupaten/Kota.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Data kuantitatif merupakan jenis data pada penelitian ini sedangkan sumber datanya yaitu data sekunder (*data pooling*). *Data pooling* artinya kelompok data yang bersifat individu untuk dilakukan penelitian dalam rentang waktu tertentu. Sumber data dari dari kantor BPS Propinsi Jawa Tengah yang dipergunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Data tahun 2012-2014 berupa PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000
- b. Data tahun 2012-2014 berupa PAD.
- c. Data tahun 2012-2014 berupa DAU
- d. Data tahun 2012-2014 berupa SILPA
- e. Data tahun 2012-2014 berupa Belanja Modal.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu bentuk dari upaya awal dalam pengumpulan data melalui prosedur standar. Metode dokumentasi dipilih sebagai metode pengumpulan data, yaitu pengumpulan berbagai data atau catatan yang dibutuhkan sesuai dengan tema penelitian dan berasal lembaga/dinas/kantor/ instansi terkait (Arikunto, 2002). Dokumen yang digunakan bersifat resmi. Selain

itu, peneliti juga melakukan pengumpulan melalui studi pustaka dari jurnal ilmiah, buletin, laporan penelitian, buku–buku, dan penerbitan lain yang relevan dengan penelitian ini.

3.6. Teknis Analisis Data

3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menunjukkan gambaran umum mengenai kondisi dari masing-masing variabel yang berupa nilai rata-rata dari masing-masing variabel, nilai terendah, nilai tertinggi dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Selain itu juga ditampilkan pola yang terbentuk dari masing-masing variabel.

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah uji yang digunakan untuk mendeteksi penyimpangan asumsi yang seharusnya tidak ada pada model regresi berganda (Gujarati, 1995).

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas ditujukan untuk melihat normal tidaknya suatu data. Deteksi normalitas dapat menggunakan histogram, garis normal, dan *Kolmogorov Smirnov*. Kriteria ujinya, data normal bila terbentuk kurva lonceng tepat ditengah histogram, data berada menempel pada garis normal, dan signifikansi *kolmoogrov smirnov* di atas 5% (Ghozali, 2007).

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ditujukan untuk melihat berkorelasi atau tidaknya antar variabel bebasnya. Bila nilai VIF > 10 terjadi multikolinearitas yang

berbahaya (Hair *et al.*1992). Deteksinya multikolinearitas menggunakan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Kriteria ujinya, data terbebas dari multikolinearitas bila *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10 (Gujarati, 1995)..

3.6.2.3 Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk mendeteksi residual yang berkorelasi dengan periode sebelumnya (Ghozali, 2013). Bila residual antar pengamatan tidak ada yang berkorelasi maka dikatakan model regresi tergolong baik. Deteksi uji autokorelasi dengan Uji *Durbin Watson*. Kriteria ujinya yaitu tidak ada autokorelasi bila $dU < DW < 4-dU$

3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk melihat konsistensi varian pengganggu antar pengamatan. Deteksi heteroskedastisitas menggunakan metode *scatter plot*. Kriteria ujinya, dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas bila plot data menyebar dengan pola acak (tidak teratur).

3.6.3. Analisis Regresi Berganda

Untuk menguji pengaruh antar variabel, penelitian ini mempergunakan analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk membuktikan apakah ada pengaruh antara pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan sebagai variabel bebas terhadap belanja modal sebagai variabel terpengaruh.

Oleh karena menggunakan 3 variabel maka model analisis regresi yang digunakan adalah regresi berganda.

Persamaan regresi adalah :

$$BM = \alpha + \beta_1 PDRB + \beta_2 PAD + \beta_3 DAU + \beta_4 SILPA + e$$

dimana :

BM = Belanja Modal (BM)

α = Konstanta

β = Slope atau koefisien regresi atau intersep

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

SILPA = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

e = eror

3.6.4. Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif, yaitu analisis yang menggunakan perhitungan matematis dan angka-angka statistik untuk memperjelas permasalahan (Setiawan, 2004).

3.6.4.1 Uji F test

Uji F test digunakan untuk menguji pengaruh simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hipotesis :

- 1) Hipotesis nol (H_0) yaitu secara simultan tidak ada variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikatnya secara positif signifikan
- 2) Hipotesis alternatif (H_a) yaitu secara simultan ada variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikatnya secara positif signifikan.

Pengujian :

- Derajat kebebasan (db) = $n - k - 1$
- Tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 5\%$

Kriteria pengujian

- Hipotesis alternative (H_a) diterima apabila tingkat signifikansi $<$ dibandingkan dengan α (0,05)
- Hipotesis nol (H_0) diterima apabila tingkat signifikansi $>$ dibandingkan dengan α (0,05)

3.6.4.2 Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi (*Adjusted R²*) ditujukan untuk melihat sejauh mana variabilitas variabel bebas terhadap variabel terikat. Rentang nilainya berkisar 0-1. Tingginya koefisien determinasi (R^2) menandakan variabel independen mampu menjelaskan variabilitas terhadap dependennya. Bila koefisien determinasi tinggi namun tidak lolos uji asumsi klasik maka model penelitian tergolong tidak baik dan harus diganti dengan model lainnya.

3.6.4.3 Uji t test

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hipotesis :

- a. Hipotesis nol (H_0) yaitu secara parsial tidak ada variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikatnya secara positif signifikan.
- b. Hipotesis alternatif (H_a) yaitu secara parsial ada variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikatnya secara positif signifikan.

Pengujian :

Derajat kebebasan (db) = $n - k$

Tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 5\%$

Kriteria pengujian:

Hipotesis alternatif (H_a) diterima apabila tingkat signifikansi $<$ dibandingkan dengan α (0,05)

Hipotesis nol (H_0) diterima apabila tingkat signifikansi $>$ dibandingkan dengan α (0,05)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Sampel

Objek penelitian ini adalah 35 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 29 Pemerintah Kabupaten dan 6 Pemerintah Kota, dalam kurun waktu 3 tahun (2012-2004). Sampel yang diambil melalui metode sensus adalah keseluruhan dari populasi yaitu yang memiliki pendapatan daerah aktif dan dapat membiayai daerahnya sendiri yang dapat dilihat dari Laporan Realisasi APBD. Berikut ini adalah daftar Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi objek penelitian:

Tabel 4.1.

Daftar Kabupaten /Kota di Jawa Tengah yang Menjadi Sampel Penelitian

No	Kabupaten/Kota
1	Kab. Cilacap
2	Kab. Banyumas
3	Kab. Purbalingga
4	Kab. Banjarnegara
5	Kab. Kebumen
6	Kab. Purworejo
7	Kab. Wonosobo
8	Kab. Magelang
9	Kab. Boyolali
10	Kab. Klaten
11	Kab. Sukoharjo
12	Kab. Wonogiri
13	Kab. Karanganyar
14	Kab. Sragen
15	Kab. Grobogan
16	Kab. Blora

17	Kab. Rembang
18	Kab. Pati
19	Kab. Kudus
20	Kab. Jepara
21	Kab. Demak
22	Kab. Semarang
23	Kab. Temanggung
24	Kab. Kendal
25	Kab. Batang
26	Kab. Pekalongan
27	Kab. Pemalang
28	Kab. Tegal
29	Kab. Brebes
30	Kota Magelang
31	Kota Surakarta
32	Kota Salatiga
33	Kota Semarang
34	Kota Pekalongan
35	Kota Tegal

Sumber : www.bps.jateng

4.2 Analisa Data

4.2.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menunjukkan gambaran umum mengenai kondisi dari masing-masing variabel yang berupa nilai rata-rata dari masing-masing variabel, nilai terendah, nilai tertinggi dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Selain itu juga ditampilkan pola yang terbentuk dari masing-masing variabel.

Sampel dalam penelitian ini sejumlah 35 sampel, dengan sistem *pooled data cross sectional* yaitu menggabungkan data *cross section* dan *time series* selama 3 tahun berturut-turut, yaitu ($35 \times 3 = 105$), maka data diolah sebanyak 105.

Hasil dari statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2.
Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BELANJA MODAL	105	13.00	804.00	2.2167E2	104.87004
PENDAPATAN ASLI DAERAH	105	55.00	925.00	1.5222E2	125.30524
DANA ALOKASI UMUM	105	1.00	991.00	6.1597E2	307.37719
SILPA	58	1.00	908.00	1.8949E2	203.26916
PERTUMBUHAN EKONOMI	105	1.00	102.00	10.2190	14.59517
Valid N (listwise)	58				

Sumber: Data sekunder yang telah diolah dari SPSS 19, 2018

Dari hasil output SPSS sesuai tabel 4.1 diatas bisa diketahui data yang sudah diolah dihasilkan data yang valid ada 58. Sehingga sampel dalam penelitian ini selama 3 tahun berturut- turut yang diolah datanya sebanyak 58.

4.2.1.1 Pendapatan Asli daerah (PAD)

PAD merupakan bentuk dari perolehan pendapatan berbagai sumber yang ada daerahnya sendiri dan dipungut berdasar pada perda yang berlaku. Berdasar pada beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan jika PAD merupakan sejumlah penerimaan nilai berupa uang dari berbagai sumber dan masyarakat wilayahnya sendiri selama periode anggaran untuk mendanai masing-masing pengeluaran rutin dan penggunaan sisa anggaran untuk membiayai pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan tabel (lampiran) diketahui jika perolehan PAD terbesar tahun 2012 terdapat pada Kota Semarang senilai Rp.660.372.358 sedangkan perolehan PAD terkecilnya terdapat pada Kabupaten Wonosobo sebesar Rp.55.401.343 dan

perolehan rata-rata PAD tahun 2012 yaitu Rp. 110.570.137. Perolehan PAD terbesar tahun 2013 terdapat pada Kota Semarang senilai Rp.925.919.311 sedangkan perolehan PAD terkecilnya terdapat pada Kabupaten Blora senilai Rp.94.917.908 dan perolehan rata-rata PAD tahun 2013 yaitu Rp. 174.084.845. Perolehan PAD terbesar tahun 2014 terdapat pada Kota Semarang senilai Rp.819.742.241 sedangkan perolehan PAD terkecilnya terdapat pada Kota Salatiga senilai Rp.92.131.839 dan perolehan rata-rata PAD tahun 2014 yaitu Rp. 173.479.940.

4.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU juga dapat diartikan sebagai dana alokasi dari APBN untuk pemeratakan keuangan di berbagai daerah guna mendanai berbagai kebutuhan yang dikeluarkan dalam melaksanakan desentralisasi. Terkait dengan perimbangan keuangan daerah dan pusat, ini termasuk ke dalam konsekuensi logis dari diserahkannya wewenang pusat kepada daerah. Dengan begitu, transfer yang dilakukan oleh pemerintah cukup signifikan dalam APBN dan pemda dapat dengan bebas mempergunakan dana yang diperoleh. Dana tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki pelayanan publik yang ada atau dapat digunakan untuk kebutuhan yang tidak penting lainnya

Berdasarkan tabel (lampiran) diketahui jika perolehan DAU terbesar tahun 2012 terdapat pada Kabupaten Banyumas senilai Rp.991.945.010 sedangkan perolehan DAU terkecilnya terdapat pada Kota Salatiga senilai Rp.325.710.016 dan perolehan rata-rata DAU tahun 2012 yaitu Rp. 700.382.976. Perolehan DAU terbesar tahun 2013 terdapat pada Kabupaten Cilacap senilai Rp.1.197.315.000 sedangkan perolehan DAU terkecilnya terdapat pada Kota Salatiga senilai

Rp.358.331.867 dan perolehan rata-rata DAU tahun 2013 yaitu Rp. 794.772.385. Perolehan DAU terbesar tahun 2014 terdapat pada Kabupaten Cilacap senilai Rp.1.291.121.704 sedangkan perolehan DAU terkecilnya terdapat pada Kota Tegal senilai Rp.390.732.536 dan perolehan rata-rata DAU tahun 2014 yaitu Rp. 860.729.381.

4.2.1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yaitu selisih lebih antara realisasi pembiayaan dengan realisasi defisit anggaran. APBN dalam pelaksanaannya bisa mengakibatkan adanya sisa lebih ataupun kurang dalam sebuah pembiayaan anggaran yang kemudian diakumulasikan dalam bentuk saldo anggaran lebih.

Berdasarkan tabel (lampiran) diketahui jika perolehan SiLPA terbesar tahun 2012 terdapat pada Kota Semarang senilai Rp.635.424.331.080 sedangkan perolehan SiLPA terkecilnya terdapat pada Kabupaten Banyumas senilai Rp.4.500.000 dan perolehan rata-rata SiLPA tahun 2012 yaitu Rp. 65.944.827.435. Perolehan SiLPA terbesar tahun 2013 terdapat pada Kota Semarang senilai Rp.908.945.274.136 sedangkan perolehan terkecilnya terdapat pada Kabupaten Blora senilai Rp.120.494.000 dan perolehan rata-rata SiLPA tahun 2013 yaitu Rp. 109.099.605.059. Perolehan SiLPA terbesar tahun 2014 terdapat pada Kota Semarang senilai Rp.908.945.274.136 sedangkan perolehan terkecilnya terdapat pada Kabupaten Pemalang senilai Rp.9.667.752.030 dan perolehan rata-rata SiLPA tahun 2014 yaitu Rp. 130.956.978.406.

4.2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Pertumbuhan ekonomi umumnya memiliki perbedaan dengan definisi pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan serangkaian proses untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat berupa produksi barang dan jasa. Sedangkan kata pembangunan dapat diartikan secara luas. Cakupan proses pembangunan yaitu segala perubahan alokasi dan komposisi produksi sumber daya produksi pada berbagai sektor terkait aktivitas perekonomian, perubahan pola penyaluran pendapatan dan kekayaan di berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan kerangka kelembagaan secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat dimaknai sebagai proses naiknya *output* per kapita yang dilihat dari PDRB per kapita.

Berdasarkan tabel (lampiran) diketahui jika perolehan PE (Pertumbuhan Ekonomi) terbesar tahun 2012 terdapat pada Kota Semarang senilai Rp.24.196.487 sedangkan perolehan terkecilnya terdapat pada Kota Salatiga senilai Rp.1.018.104 dan perolehan rata-rata PE tahun 2012 yaitu Rp. 4.956.355. Perolehan PE terbesar tahun 2013 terdapat pada Kota Semarang senilai Rp.25.697.338 sedangkan perolehan PE terkecilnya terdapat pada Kota Salatiga senilai Rp.1.080.656 dan perolehan rata-rata PE tahun 2013 yaitu Rp.5.228.736. Perolehan PE terbesar tahun 2014 terdapat pada Kota Semarang senilai Rp.925.919.313 sedangkan perolehan PE terkecilnya terdapat pada Kabupaten Blora senilai Rp.94.917.908 dan perolehan rata-rata PE tahun 2014 yaitu Rp. 174.084.845.

4.2.1.5 Belanja Modal (BM)

Belanja Modal merupakan anggaran yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap dan aset lain yang bermanfaat di atas satu periode akuntansi. Belanja modal ini terdiri dari bangunan, gedung, tanah, aset tak berwujud, dan peralatan yang didapat dari hasil membelanjakan modal (PP No. 24/2005). Dengan kata lain, kegiatan belanja modal dapat menambah aset tetap/inventaris atau membentuk modal yang bermanfaat di atas satu periode akuntansi, khususnya biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas aset, menambah masa manfaat, dan memelihara/mempertahankan aset yang ada.

Berdasarkan tabel (lampiran) diketahui jika perolehan BM (belanja Modal) terbesar tahun 2012 terdapat pada Kota Semarang senilai Rp.424.037.125 sedangkan perolehan BM terkecilnya terdapat pada Kabupaten Cilacap senilai Rp.13.655.945 dan perolehan rata-rata BM tahun 2012 yaitu Rp. 193.870.163. Perolehan BM terbesar tahun 2013 terdapat pada Kota Semarang senilai Rp.591.011.412 sedangkan perolehan terkecilnya terdapat pada Kota Salatiga senilai Rp.69.203.906 dan perolehan rata-rata BM tahun 2013 yaitu Rp.210.077.330. Perolehan BM terbesar tahun 2014 terdapat pada Kota Semarang senilai Rp.804.093.757 sedangkan perolehan terkecilnya adalah Kota Magelang senilai Rp.121.709.138 dan perolehan rata-rata BM tahun 2014 yaitu Rp. 262.524.747.

4.2.2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah uji yang digunakan untuk mendeteksi penyimpangan asumsi yang seharusnya tidak ada pada model regresi berganda (Gujarati, 1995). Berikut adalah jenis-jenis pengujian asumsi klasik, yaitu :

4.2.2.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas ditujukan untuk melihat normal tidaknya suatu data. Deteksi normalitas dapat menggunakan histogram, garis normal, dan *Kolmogorov Smirnov*. Kriteria ujinya, data normal bila terbentuk kurva lonceng tepat ditengah histogram, data berada menempel pada garis normal, dan signifikansi *kolmoogrov smirnov* di atas 5% (Ghozali, 2013). Hasil-hasil uji normalitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		58
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	66.20274604
Most Extreme Differences	Absolute	.057
	Positive	.057
	Negative	-.057
Kolmogorov-Smirnov Z		.434
Asymp. Sig. (2-tailed)		.992
a. Test distribution is Normal.		

Sumber : Lampiran output SPSS, 2018

Tabel 4.9 memperlihatkan jika signifikansi *kolmogorov smirnov* yaitu 0,992 berada di atas 0,05 yang memperkuat bila residual telah mengikuti distribusi normal.

4.2.2.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ditujukan untuk melihat berkorelasi atau tidaknya antar variabel bebasnya. Bila nilai VIF > 10 terjadi multikolinearitas yang berbahaya (Hair *et al.*1992). Deteksinya multikolinearitas menggunakan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Kriteria ujinya, data terbebas dari multikolinearitas bila *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Berikut adalah hasil uji multikolinearitas dengan menggunakan nilai VIF: Hasil uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	95% Confidence Interval for B		Collinearity Statistics	
	Lower Bound	Upper Bound	Tolerance	VIF
1 (Constant)	90.131	185.057		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	.248	.621	.373	2.681
DANA ALOKASI UMUM	.073	.038	.844	1.185
SILPA	.140	.164	.349	2.867
PERTUMBUHAN EKONOMI	.981	3.869	.526	1.900

Sumber : Lampiran output SPSS, 2018

Tabel 4.3 memperlihatkan jika seluruh variabel penelitian mempunyai nilai *tolerance* $> 0,10$. Begitu pula nilai VIF memperlihatkan nilai VIF < 10 . Artinya, seluruh variabel bebas pada penelitian ini terbebas dari gejala multikolinieritas. Dengan kata lain, seluruh variabel saling bersifat tidak terikat..

4.2.2.3 Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk mendeteksi residual yang berkorelasi dengan periode sebelumnya (Ghozali, 2013). Bila residual antar pengamatan tidak ada

yang berkolerasi maka dikatakan model regresi tergolong baik. Deteksi uji autokorelasi dengan Uji *Durbin Watson*. Kriteria ujinya yaitu tidak ada autokolerasi bila $dU < DW < 4-dU$ (Ghozali, 2013). Hasil uji autokolerasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.847 ^a	.717	.696	68.65553	1.894

a. Predictors: (Constant), PERTUMBUHAN EKONOMI, DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH, SILPA

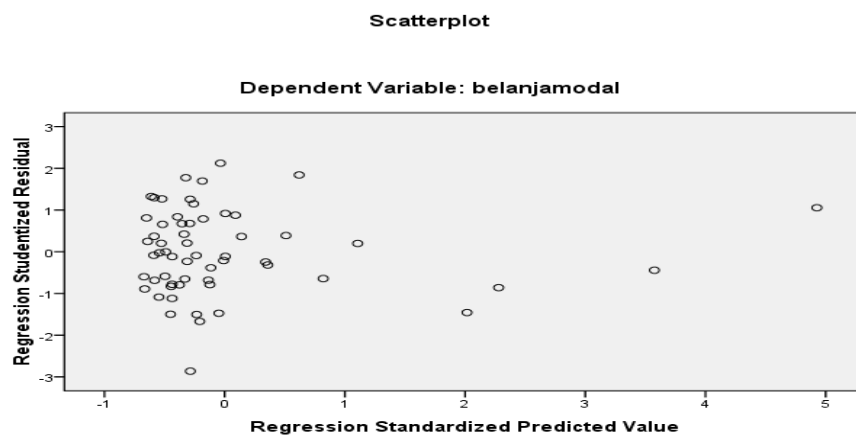
b. Dependent Variabel: PENGALOKASIAN BELANJA MODAL

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2018

Tabel 4.4 memperlihatkan jika DW bernilai 1,894. Nilai DW tersebut telah sesuai dengan $dU < DW < 4-dU$ dimana $dU=1,74$ dan $4-dU = 4 - 1,74 = 2,26$. Bila nilainya diletakkan pada notasi matematis adalah $1,74 < 1,894 < 2,26$. Maka dengan hasil tersebut dapat dikatakan jika pada model regresi tidak mengalami autokorelasi.

4.2.2.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji ini ditujukan untuk melihat konsistensi varian pengganggu antar pengamatan. Deteksi heteroskedastisitas menggunakan metode *scatter plot*. Kriteria ujinya, dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas bila plot data menyebar dengan pola acak (tidak teratur) (Ghozali, 2013). Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 1.
Diagram Heteroskedastisitas.

Sumber : Lampiran output SPSS, 2018

Gambar 4.2 memperlihatkan jika plot data menyebar dengan pola acak (tidak teratur) maka dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

4.2.3 Hasil Persamaan Regresi Linier Berganda

Pada metode regresi linier beranda akan dijelaskan antara pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dan profitabilitas terhadap manajemen laba. Sebelum dilakukan pengujian terlebih dahulu dijelaskan hasil persamaan regresi berikut.

Tabel 4.6.
Persamaan Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	137.594	23.664		5.815	.000
PENDAPATAN ASLI DAERAH	.434	.093	.558	4.665	.000
DANA ALOKASI UMUM	.017	.028	.050	4.626	.534
SILPA	.012	.076	.020	3.158	.875
PERTUMBUHAN EKONOMI	2.425	.720	.339	3.369	.001

a. Dependent Variabel: PENGALOKASIAN BELANJA MODAL

Sumber : Lampiran output SPSS, 2018

Persamaan regresi yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut (dalam jutaan):

$$\mathbf{BM = 137.594 + 0,434PAD + 0,017DAU + 0,012SILPA + 2,425PE}$$

Berdasarkan persamaan tersebut, menjelaskan bahwa :

- Pendapatan Asli daerah (PAD) dengan koefisien regresi sebesar 0,434 bertanda positif artinya bila terjadi perubahan PAD senilai 1% maka Belanja Modal naik sebesar 0,434 (43,4%).
- Dana Alokasi Umum (DAU) dengan koefisien regresi sebesar 0,017 bertanda positif artinya bila terjadi perubahan DAU senilai 1% maka Belanja Modal naik sebesar 0,017 (1,7%)
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dengan koefisien regresi sebesar 0,012 bertanda positif artinya bila terjadi perubahan SiLPA senilai 1% maka Belanja Modal naik sebesar 0,012 (1,2%)
- Pertumbuhan Ekonomi (PE) dengan koefisien regresi sebesar 2,426 bertanda positif artinya bila terjadi perubahan PE sebesar 1% maka Belanja Modal naik sebesar 2,426 (24,26%).

4.2.4. Uji F

Tabel 4.7.
Hasil Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	633079.976	4	158269.994	33.577	.000 ^a
	Residual	249819.804	53	4713.581		
	Total	882899.780	57			

a. Predictors: (Constant), PERTUMBUHAN EKONOMI, DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH, SILPA

b. Dependent Variabel: PENGALOKASIAN BELANJA MODAL

Sumber : Lampiran output SPSS, 2018

Berdasarkan tabel 4.7 diatas diperoleh nilai F hitung sebesar 33.577 dan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat diartikan bahwa model regresi tergolong fit atau baik, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi penelitian yang akan datang.

4.2.5 Analisis Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi (*Adjusted R²*) ditujukan untuk melihat sejauh mana variabilitas variabel bebas terhadap variabel terikat. Rentang nilainya berkisar 0-1. Tingginya koefisien determinasi (R^2) menandakan variabel independen mampu menjelaskan variabilitas terhadap dependennya. Bila koefisien determinasi tinggi namun tidak lolos uji asumsi klasik maka model penelitian tergolong tidak baik dan harus diganti dengan model lainnya Hasil uji Koefisien determinasi (*Adjusted R²*) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8.
Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^a									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.847 ^a	.717	.696	68.65553	.717	33.577	4	53	.000

a. Predictors: (Constant), PERTUMBUHAN EKONOMI, DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH, SILPA

b. Dependent Variabel: PENGALOKASIAN BELANJA MODAL

Sumber : Lampiran output SPSS, 2018

Tabel 4.8 memperlihatkan jika koefisien determinasi (*adjusted R²*) bernilai 0,696 atau 69,6%. Maka dapat dikatakan Belanja Modal pada Kab./Kota di Jawa Tengah mampu dijelaskan oleh PAD, DAU, SiLPA dan PE, sedangkan 30,4% sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

4.2.6 Hasil Uji t

Tabel 4.9.
Hasil Uji t

Variabel	Koef.	T	Sig	Hasil	Keterangan
Konstanta	137.594	5.815	.000		
PAD	.434	4.665	.000	Signifikan	Ho ditolak
DAU	.017	4.626	.534	Tidak Signifikan	Ho diterima
SiLPA	.012	3.158	.875	Tidak Signifikan	Ho diterima
PE	2.425	3.369	.001	Signifikan	Ho ditolak

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat disimpulkan mengenai uji hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, sebagai berikut:

- 1) Pengujian parsial.pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui jika PAD memiliki nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ maka hipotesis 1 (H1) yang diajukan dinyatakan diterima

atau terbukti bila ada pengaruh signifikan PAD terhadap Belanja Modal pada Kab./Kota di Jawa Tengah.

2) Pengujian parsial pengaruh DAU terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui jika DAU memiliki nilai signifikansi sebesar $0.534 > 0.05$ maka hipotesis 2 (H2) yang diajukan dinyatakan ditolak atau terbukti bila tidak ada pengaruh signifikan DAU terhadap Belanja Modal pada Kab./Kota di Jawa Tengah.

3) Pengujian parsial SiLPA terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui jika SiLPA memiliki nilai signifikansi sebesar $0.875 > 0.05$ maka hipotesis 3 (H3) yang diajukan dinyatakan ditolak atau terbukti bila tidak ada pengaruh signifikan SiLPA terhadap Belanja Modal pada Kab./Kota di Jawa Tengah.

4) Pengujian persial pengaruh PE terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui jika PE memiliki nilai signifikansi sebesar $0.001 < 0.05$ maka hipotesis 4 (H4) yang diajukan dinyatakan diterima atau terbukti bila ada pengaruh signifikan SiLPA terhadap Belanja Modal pada Kab./Kota di Jawa Tengah.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Pengujian hipotesis pertama memperlihatkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. PAD merupakan bentuk dari perolehan pendapatan berbagai sumber yang ada daerahnya sendiri dan dipungut berdasar pada perda yang berlaku. Tingginya

perolehan PAD suatu daerah mengindikasikan jika kinerja pemerintah daerah telah dikategorikan baik, sehingga dapat meningkatkan alokasi dana untuk Belanja Modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Febriana dan Praptoyo (2015), Andriani dan Yuliana (2016), Aditia dan Dirgantari (2017), dengan hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Adapun penelitian yang tidak sejalan yaitu penelitian Darmayasa dan Suandi (2014), Adyatma dan Oktaviani (2015), dan Sugiyanta (2016), hasil penelitian PAD secara parsial tidak mempengaruhi Belanja Modal.

4.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Pengujian hipotesis kedua memperlihatkan hasil bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disebabkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam praktiknya dimanfaatkan untuk belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan. Sedangkan fungsi adanya Dana Alokasi Umum (DAU) adalah alokasi dana untuk pemerataan kemampuan finansial antar daerah dan untuk memenuhi kebutuhan daerah bukti dari terlaksananya desentralisasi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Andriani dan Yuliana (2016), dan Aditia dan Dirgantari (2017), Purnama (2014), Keswondo dkk (2016) dan Apriyanto (2016), dengan hasil penelitian Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Adapun penelitian yang

tidak sejalan yaitu penelitian Adyatma dan Oktaviani (2015), dan Sugiyanta (2016), Febriana dan Praptoyo (2015), Nurhidayari dan Yahya (2013), Darmayasa dan Suandi (2014), yang menyimpulkan jika DAU mempengaruhi Belanja Modal secara parsial.

4.3.3 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal

Pengujian hipotesis ketiga memperlihatkan hasil bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan praktik yang dilakukan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah, untuk membelanjakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam bentuk belanja pembelian/pengeluaran/pengadaan barang/jasa yang mampu bertahan manfaatnya hingga 1 tahun.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nurhidayari dan Yahya (2013), Febriana dan Praptoyo (2015), Aditia dan Dirgantari (2017), hasil penelitian Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan penelitian yang tidak sejalan dengan hasil penelitian Andriani dan Yuliana (2016), Sugiyanta (2016), hasil penelitian SiLPA secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

4.3.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Pengujian hipotesis keempat hasil bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Tingginya Pertumbuhan Ekonomi dapat meningkatkan Belanja Modal dan sebaliknya rendahnya

Pertumbuhan Ekonomi dapat menurunkan Belanja Modal. Indikator keberhasilan pembangunan salah satunya adalah Pertumbuhan Ekonomi sehingga bila Pertumbuhan Ekonomi meningkat maka kesejahteraan masyarakat akan semakin tinggi, walaupun ada indikator lain yang dapat digunakan sebagai acuan kesejahteraan masyarakat yaitu distribusi pendapatan.

Pertumbuhan Ekonomi adalah suatu nilai yang dapat memperlihatkan naiknya aktivitas ekonomi setiap tahun oleh suatu daerah. Syarat yang paling mendasar dalam membangun perekonomian yaitu keseimbangan antara tingkat pengadaan modal pembangunan dengan jumlah penduduk yang semakin banyak. Pertambahan sarana prasarana dan perbaikan yang dilakukan oleh pemda diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Umumnya, bila suatu daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, maka pemda akan terus menambah dari tahun ke tahun alokasi Belanja Modalnya untuk memperbaiki dan melengkapi fasilitas publik, tetapi situasi dan kondisi tahun anggaran menjadi pertimbangan utamanya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007), Rusmanto (2013), yang menyimpulkan jika Pertumbuhan Ekonomi memberikan pengaruh yang positif atas Belanja Modal. Sedangkan penelitian yang tidak sejalan dengan hasil penelitian Kasyati (2015), hasil penelitian Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Pertumbuhan Ekonomi (PE) terhadap Belanja Modal. Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Tingginya PAD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan memperbesar pengeluaran untuk alokasi belanja di daerahnya. Nilai PAD juga memperlihatkan tingkat kemandirian daerah. PAD yang semakin banyak maka akan timbul kecenderungan suatu daerah untuk tidak bergantung terhadap pusat dalam memenuhi kebutuhan belanjanya. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah memiliki kemampuan untuk mandiri, dan sebaliknya.
2. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Pemerintah daerah umumnya lebih memusatkan perhatian pada proporsi alokasi DAU ke Belanja Modal. Tetapi yang terjadi DAU yang lebih besar dipergunakan untuk mendanai belanja lainnya. Contohnya, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja barang, dan belanja pegawai.

3. Variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Pembangunan SiLPA yang cenderung besar menunjukkan lemahnya eksekutif di bidang perencanaan dan pengelolaan dana, sehingga sebagian atau seluruh SiLPA lebih diprioritaskan untuk belanja pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan atau digunakan untuk pemakaian jasa dalam program dan kegiatan pemerintah daerah.
4. Variabel Pertumbuhan Ekonomi memberikan pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi sebaiknya diiringi dengan pemerataan agar tidak hanya sebagian golongan saja yang sejahtera. Anggaran belanja modal sebaiknya diperuntukkan untuk bidang-bidang yang penting bagi masyarakat seperti bidang pendidikan dan kesehatan serta untuk penciptaan lapangan kerja sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penelitian-penelitian berikutnya agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya berdasarkan data kuantitatif, yaitu data realisasi anggaran pada akhir tahun anggaran.
2. Nilai *Adjusted R square* dalam mempengaruhi belanja modal sebesar 69,6%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak variabel lain yang belum dipertimbangkan dalam penelitian ini yang mempunyai pengaruh terhadap belanja modal.

5.3 Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini ada beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya, mengingat populasi penelitian yang berjumlah 35 kabupaten/kota ada baiknya untuk mengambil lingkup penelitian yang lebih besar, seperti kabupaten/kota se Jawa . Serta menambah periode tahun pengamatan dengan minimal pengamatan selama 5 tahun.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian akan datang diharapkan lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lainnya, seperti jenis-jenis penerimaan daerah lainnya maupun variabel non-keuangan seperti kebijakan pemerintah.
3. Optimalisasi potensi penerimaan daerah dalam bentuk PAD merupakan salah satu alternatif sumber penerimaan utama Pemda. Untuk itu peningkatan PAD dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi perlu mendapat perhatian Pemda, termasuk membenahi regulasi yang terkait dengan peningkatan PAD.
4. Bagi Pemda untuk lebih memperhatikan besar kecilnya SiLPA mengingat besaran SiLPA sangat ditentukan oleh kemampuan Pemda dalam mengestimasi pendapatan dan belanja, dan kemampuan SKPD dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. Dan A. Halim. (2006). Studi atas Belanja Modal pada Penganggaran Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2: 17-32.
- Abdullah, S., & Abdul, H. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Volume 2(1): 53-64.
- Aditia, N. Y., & Dirgantari, N. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2013-2015. *KOMPARTEMEN*, Vol. XV No.1. 43-46.
- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Vol. 4, No. 2. 191-195.
- Andriani, N. P., & Yuliana, L. (2016). Analisis Determinan Belanja Modal. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, Volume 3 Nomor 3.
- Apriyanto J. J. W. (2016). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal kabupaten/kota di provinsi Jawa tengah periode 2013-2014. *Skripsi*.
- Aprizay, Y. S., Darwanis, & Arfan, M. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 3, No. 1. 141-145.
- Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian Pendekatan suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darmayasa, I. N., & Suandi, I. K. 2014. Faktor Penentu Alokasi Belanja Modal dalam APBD Pemerintah Provinsi. *Simposium Nasional Akuntansi 17, Lombok*, Universitas Mataram 24-27 September 2014.
- Darwanto, & Yustikasar. (2007). Volume 3, No. 1. 141.
- Febriana, I. S. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 4 No. 9. 1-6.
- Ghozali, Imam. (2013). "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Kasyati . (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Dana bagi Hasil, dan Kemandirian Fiskal Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah). *Skripsi*
- Keswando, (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan luas wilayah daerah terhadap alokasi belanja modal studi empiris di provinsi jawa timur. *Skripsi*
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi Daerah &Manajemen Keuangan Daerah*.Yogyakarta: Andi.
- Mentayani, Ida dan Rusmanto. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di pulau Kalimantan. *Jurnal Infestasi* Vol. 9 No. 2 Desember 2013, Hal 91-102.
- Ndede, Y., Sondakh, J., & Pontoh, W. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) dan Dana. *Yunistin Ndede*, Volume 16 No. 03. 587-593.
- Nurhidayati & Yahya . (2013). Alokasi Belanja modal untuk Pelayanan Publik Praktik di Pemerintahan Daerah. *Skripsi*
- Oktora, F. E., & Pontoh, W. (2013). Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan. *JURNAL ACCOUNTABILITY* , VOL. 2 NO. 1. 2-5.
- Purnama, Arif. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Periode 2012-2013..*Skripsi*
- Putu Oka, N. A., & Yuliana, L. (2016). Analisis Determinan Belanja Modal. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, Volume 3 Nomor 3 .140-144.
- Salindeho, C. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) dan Dana Alokasi Khusus (Dak). *Jurnal EMBA*, Vol.4 No.3. 705-716.
- Saragih, J. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Simanjuntak, K. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi. *Jurnal Bina Praja*, Volume 7 Nomor 2 Edisi.
- Sugiyanta. (2016). Analisis Belanja Modal Dan Faktor-Faktor. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, Vol. 14 No. 1. 19-21.

Tolu, A., Walewangko, & Tumangkeng, S. Y. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 16 No. 02. 542.

<http://www.dppad.jatengprov.go.id>.

<http://www.bps.go.id>.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Perusahaan Sampel

No	Kabupaten/Kota
1	Kab. Cilacap
2	Kab. Banyumas
3	Kab. Purbalingga
4	Kab. Banjarnegara
5	Kab. Kebumen
6	Kab. Purworejo
7	Kab. Wonosobo
8	Kab. Magelang
9	Kab. Boyolali
10	Kab. Klaten
11	Kab. Sukoharjo
12	Kab. Wonogiri
13	Kab. Karanganyar
14	Kab. Sragen
15	Kab. Grobogan
16	Kab. Blora
17	Kab. Rembang
18	Kab. Pati
19	Kab. Kudus
20	Kab. Jepara
21	Kab. Demak
22	Kab. Semarang
23	Kab. Temanggung
24	Kab. Kendal
25	Kab. Batang
26	Kab. Pekalongan
27	Kab. Pemalang
28	Kab. Tegal
29	Kab. Brebes
30	Kota Magelang
31	Kota Surakarta
32	Kota Salatiga
33	Kota Semarang
34	Kota Pekalongan
35	Kota Tegal

Lampiran 2. Pendapatan Asli daerah (PAD) (Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014
1	Kab. Cilacap	90,370,471	278,890,649	230,155,062
2	Kab. Banyumas	188,589,671	308,349,434	317,727,920
3	Kab. Purbalingga	91,191,270	122,858,740	162,115,573
4	Kab. Banjarnegara	63,548,916	98,975,319	103,502,350
5	Kab. Kebumen	79,175,978	131,481,737	126,853,275
6	Kab. Purworejo	77,073,808	127,565,801	135,087,317
7	Kab. Wonosobo	55,401,343	108,729,508	107,655,071
8	Kab. Magelang	95,290,105	173,253,652	134,569,004
9	Kab. Boyolali	108,796,100	160,752,450	181,450,406
10	Kab. Klaten	75,874,326	115,441,420	100,379,375
11	Kab. Sukoharjo	124,642,660	192,971,720	179,166,738
12	Kab. Wonogiri	75,187,258	111,592,606	140,193,086
13	Kab. Karanganyar	89,499,158	161,715,928	143,021,955
14	Kab. Sragen	89,875,454	146,721,552	137,995,951
15	Kab. Grobogan	84,755,391	143,586,364	172,171,998
16	Kab. Blora	61,400,000	94,917,908	119,769,424
17	Kab. Rembang	89,947,696	126,808,084	139,991,163
18	Kab. Pati	131,187,727	169,127,416	173,223,183
19	Kab. Kudus	113,622,250	144,995,092	168,382,095
20	Kab. Jepara	103,713,877	133,778,055	182,092,319
21	Kab. Demak	78,032,015	138,214,446	158,654,138
22	Kab. Semarang	129,934,892	215,679,554	211,839,753
23	Kab. Temanggung	66,428,523	102,080,198	98,995,825
24	Kab. Kendal	87,150,664	136,029,703	155,567,388
25	Kab. Batang	56,175,216	143,502,571	108,938,221
26	Kab. Pekalongan	86,764,834	148,496,886	153,761,074
27	Kab. Pemasang	77,349,379	136,362,282	117,133,686
28	Kab. Tegal	84,974,465	156,244,860	180,429,994
29	Kab. Brebes	160,496,104	135,055,401	153,413,784
30	Kota Magelang	63,085,389	107,739,839	98,314,096
31	Kota Surakarta	189,736,947	298,400,847	297,026,865
32	Kota Salatiga	63,280,944	106,100,451	92,131,839
33	Kota Semarang	660,372,358	925,919,311	819,742,241
34	Kota Pekalongan	59,819,108	114,252,439	104,202,720
35	Kota Tegal	117,210,496	176,377,335	166,143,023
Total		3,869,954,793	6,092,969,558	6,071,797,912
Maksimum		660,372,358	925,919,311	819,742,241
Minimum		55,401,343	94,917,908	92,131,839
Rata-rata		110,570,137	174,084,845	173,479,940

Dana Alokasi Umum (DAU) (Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014
1	Kab. Cilacap	617,054,676	1,197,315,060	1,291,121,704
2	Kab. Banyumas	991,945,010	1,127,939,938	1,224,710,992
3	Kab. Purbalingga	640,265,476	719,185,020	777,989,499
4	Kab. Banjarnegara	681,395,924	763,426,567	826,044,419
5	Kab. Kebumen	906,222,007	1,021,871,180	1,125,568,884
6	Kab. Purworejo	711,741,839	793,904,679	854,737,495
7	Kab. Wonosobo	597,858,484	665,548,034	724,245,009
8	Kab. Magelang	816,732,604	899,528,369	965,124,427
9	Kab. Boyolali	780,301,856	871,685,981	943,220,456
10	Kab. Klaten	967,284,829	1,066,318,427	1,142,586,588
11	Kab. Sukoharjo	680,235,009	763,462,900	826,891,481
12	Kab. Wonogiri	828,479,528	917,476,557	1,001,378,439
13	Kab. Karanganyar	720,918,512	810,216,582	870,001,752
14	Kab. Sragen	778,668,035	869,155,545	946,826,641
15	Kab. Grobogan	812,990,740	906,666,365	977,675,512
16	Kab. Blora	673,180,530	753,830,036	823,874,089
17	Kab. Rembang	570,454,948	640,273,360	700,774,721
18	Kab. Pati	850,377,211	960,479,326	1,043,498,355
19	Kab. Kudus	637,615,372	719,406,935	795,851,851
20	Kab. Jepara	712,740,462	814,380,324	887,768,694
21	Kab. Demak	658,971,337	737,911,647	795,874,748
22	Kab. Semarang	691,271,583	778,604,920	848,736,010
23	Kab. Temanggung	584,158,278	651,171,674	681,657,500
24	Kab. Kendal	702,708,128	788,134,078	852,170,849
25	Kab. Batang	577,238,039	641,663,630	682,182,894
26	Kab. Pekalongan	678,713,899	768,500,117	831,579,000
27	Kab. Pemasang	827,163,222	931,426,998	1,016,813,333
28	Kab. Tegal	860,568,434	925,576,304	1,044,211,310
29	Kab. Brebes	981,051,188	1,098,999,510	1,186,969,845
30	Kota Magelang	348,498,193	385,859,241	417,211,449
31	Kota Surakarta	681,813,458	659,647,382	710,803,934
32	Kota Salatiga	325,710,016	358,331,867	399,083,343
33	Kota Semarang	936,865,926	1,054,002,569	1,104,739,473
34	Kota Pekalongan	347,390,356	384,489,368	412,871,094
35	Kota Tegal	334,819,065	370,642,983	390,732,536
Total		24,513,404,174	27,817,033,473	30,125,528,326
Maksimum		991,945,010	1,197,315,060	1,291,121,704
Minimum		325,710,016	358,331,867	390,732,536
Rata-rata		700,382,976	794,772,385	860,729,381

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) (Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014
1	Kab. Cilacap	276,726,859,571	342,416,365,210	489,322,012,947
2	Kab. Banyumas	4,500,000	331,470,960,480	351,088,203,999
3	Kab. Purbalingga	83,828,372,265	160,873,912,000	169,283,609,000
4	Kab. Banjarnegara		164,683,962,000	-
5	Kab. Kebumen	112,297,930	112,297,925,000	60,586,902,000
6	Kab. Purworejo	-	85,380,519,230	-
7	Kab. Wonosobo	-	-	297,157,825,674
8	Kab. Magelang	359,987,753,873	162,263,141,398	-
9	Kab. Boyolali	73,643,053	73,720,210,048	118,136,883,489
10	Kab. Klaten	1,165,882,059	62,793,184,023	-
11	Kab. Sukoharjo	-	-	-
12	Kab. Wonogiri	-	40,051,180,100	-
13	Kab. Karanganyar	-	-	-
14	Kab. Sragen	91,583,990,445	31,007,031,951	247,700,000,000
15	Kab. Grobogan	139,135,182,834	-	164,422,398,052
16	Kab. Blora	-	120,495,000	-
17	Kab. Rembang	12,657,898,790	101,078,954,678	825,000,567,856
18	Kab. Pati		162,767,453,579	204,993,708,308
19	kab. Kudus	-	-	-
20	Kab. Jepara	-	-	-
21	Kab. Demak	-	-	-
22	Kab. Semarang	125,944,000,000	152,542,000,000	-
23	Kab. Temanggung	-	8,614,397,758	52,977,653,496
24	Kab. Kendal	82,672,669,145	68,560,101,855	141,033,448,824
25	Kab. Batang	-	-	-
26	Kab. Pekalongan	-	-	-
27	Kab. Pemalang	-	147,929,619,296	9,667,752,030
28	Kab. Tegal	-	106,100,928,110	
29	Kab. Brebes	118,368,000,000	267,648,000,000	379,651,379,651
30	Kota Magelang	111,574,258,920	109,584,351,208	
31	Kota Surakarta	95,706,261,245	-	163,526,624,733
32	Kota Salatiga	-	-	-
33	Kota Semarang	635,424,331,080	908,945,274,136	908,945,274,136
34	Kota Pekalongan	101,380,097,000	90,733,899,000	
35	Kota Tegal	71,722,962,000	126,902,311,000	
	Total	2,308,068,960,210	3,818,486,177,059	4,583,494,244,195
	Maksimum	635,424,331,080	908,945,274,136	908,945,274,136
	Minimum	4,500,000	120,495,000	9,667,752,030
	Rata-rata	65,944,827,435	109,099,605,059	130,956,978,406

Pertumbuhan Ekonomi (PE) (Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014
1	Kab. Cilacap	14,517,885.27	15,352,290.57	278,890,649
2	Kab. Banyumas	5,221,519.49	5,571,940.87	308,349,434
3	Kab. Purbalingga	2,845,663.33	3,006,626.67	122,858,740
4	Kab. Banjarnegara	3,189,651.65	3,357,960.15	98,975,319
5	Kab. Kebumen	3,242,111.77	3,378,160.30	131,481,737
6	Kab. Purworejo	3,327,672.40	3,493,600.85	127,565,801
7	Kab. Wonosobo	2,075,562.03	2,179,015.39	108,729,508
8	Kab. Magelang	4,542,888.65	4,797,319.01	173,253,652
9	Kab. Boyolali	4,725,558.65	4,982,065.57	160,752,450
10	Kab. Klaten	5,211,757.15	5,513,307.86	115,441,420
11	Kab. Sukoharjo	5,468,708.95	5,742,876.93	192,971,720
12	Kab. Wonogiri	3,325,089.57	3,470,048.41	111,592,606
13	Kab. Karanganyar	6,086,877.13	6,414,504.10	161,715,928
14	Kab. Sragen	3,485,992.03	3,717,488.14	146,721,552
15	Kab. Grobogan	3,578,062.78	3,742,249.81	143,586,364
16	Kab. Blora	2,278,804.85	2,390,800.07	94,917,908
17	Kab. Rembang	2,500,796.46	2,626,475.93	126,808,084
18	Kab. Pati	5,114,682.32	5,407,167.36	169,127,416
19	kab. Kudus	13,754,585.17	14,398,651.02	144,995,092
20	Kab. Jepara	4,763,305.81	5,038,103.63	133,778,055
21	Kab. Demak	3,302,610.17	3,455,273.15	138,214,446
22	Kab. Semarang	6,223,188.31	6,573,208.40	215,679,554
23	Kab. Temanggung	2,648,488.46	2,781,320.87	102,080,198
24	Kab. Kendal	6,033,632.04	6,350,000.08	136,029,703
25	Kab. Batang	2,611,528.72	2,746,480.23	143,502,571
26	Kab. Pekalongan	3,564,599.07	3,758,993.95	148,496,886
27	Kab. Pemasang	3,813,839.22	4,020,038.98	136,362,282
28	Kab. Tegal	4,001,204.96	4,233,513.40	156,244,860
29	Kab. Brebes	6,082,267.39	6,390,184.05	135,055,401
30	Kota Magelang	1,245,158.09	1,318,707.97	107,739,839
31	Kota Surakarta	5,742,861.31	6,080,954.07	298,400,847
32	Kota Salatiga	1,018,104.45	1,080,656.98	106,100,451
33	Kota Semarang	24,196,487.78	25,697,338.93	925,919,311
34	Kota Pekalongan	2,323,147.40	2,460,946.93	114,252,439
35	Kota Tegal	1,408,144.10	1,477,505.82	176,377,335
Total		173,472,437	183,005,776	6,092,969,558
Maksimum		24,196,488	25,697,339	925,919,311
Minimum		1,018,104	1,080,657	94,917,908
Rata-rata		4,956,355	5,228,736	174,084,845

Anggaran Belanja Modal (BM) (Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014
1	Kab. Cilacap	13,655,945	421,172,662	373,902,534
2	Kab. Banyumas	267,277,917	313,188,976	364,730,687
3	Kab. Purbalingga	126,405,420	112,767,370	129,737,334
4	Kab. Banjarnegara	172,880,238	175,918,010	235,343,224
5	Kab. Kebumen	220,424,037	286,958,914	369,221,753
6	Kab. Purworejo	171,088,228	180,854,185	218,582,362
7	Kab. Wonosobo	208,887,669	138,195,098	318,103,920
8	Kab. Magelang	261,239,440	108,603,624	381,113,233
9	Kab. Boyolali	182,775,486	249,111,726	302,476,148
10	Kab. Klaten	183,942,273	186,883,543	256,706,189
11	Kab. Sukoharjo	193,153,573	209,691,364	213,613,793
12	Kab. Wonogiri	204,300,232	192,048,803	190,342,988
13	Kab. Karanganyar	105,905,189	148,478,744	206,587,666
14	Kab. Sragen	166,719,696	141,263,726	219,751,527
15	Kab. Grobogan	259,428,803	353,074,204	296,496,033
16	Kab. Blora	263,637,812	260,455,401	350,244,676
17	Kab. Rembang	197,513,587	135,447,797	189,999,035
18	Kab. Pati	179,057,762	203,474,444	251,216,733
19	kab. Kudus	197,248,839	132,972,460	280,674,853
20	Kab. Jepara	191,819,841	158,798,848	193,656,405
21	Kab. Demak	314,747,385	352,309,888	304,806,376
22	Kab. Semarang	227,370,175	227,584,379	248,224,062
23	Kab. Temanggung	94,993,661	103,805,508	242,912,175
24	Kab. Kendal	224,223,485	155,398,901	273,145,530
25	Kab. Batang	134,437,857	148,266,470	182,269,633
26	Kab. Pekalongan	160,582,860	184,320,224	207,230,817
27	Kab. Pemasang	205,883,968	249,976,020	170,487,882
28	Kab. Tegal	287,340,191	215,975,069	298,329,484
29	Kab. Brebes	284,054,709	325,810,773	254,545,629
30	Kota Magelang	123,516,973	142,588,510	121,709,138
31	Kota Surakarta	196,087,207	244,975,524	278,055,794
32	Kota Salatiga	150,127,361	69,203,906	185,327,584
33	Kota Semarang	424,037,125	591,011,412	804,093,757
34	Kota Pekalongan	104,502,783	131,315,591	147,374,979
35	Kota Tegal	86,187,971	100,804,467	127,352,205
Total		6,785,455,698	7,352,706,541	9,188,366,138
Maksimum		424,037,125	591,011,412	804,093,757
Minimum		13,655,945	69,203,906	121,709,138
Rata-rata		193,870,163	210,077,330	262,524,747

Lampiran 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum
BELANJA MODAL	105	13.00	804.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	105	55.00	925.00
DANA ALOKASI UMUM	105	1.00	991.00
SILPA	58	1.00	908.00
PERTUMBUHAN EKONOMI	105	1.00	102.00
Valid N (listwise)	58		

Hasil uji asumsi klasik

- Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		58
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	66.20274604
Most Extreme Differences	Absolute	.057
	Positive	.057
	Negative	-.057
Kolmogorov-Smirnov Z		.434
Asymp. Sig. (2-tailed)		.992
a. Test distribution is Normal.		

- Hasil Uji Multikolinearitas

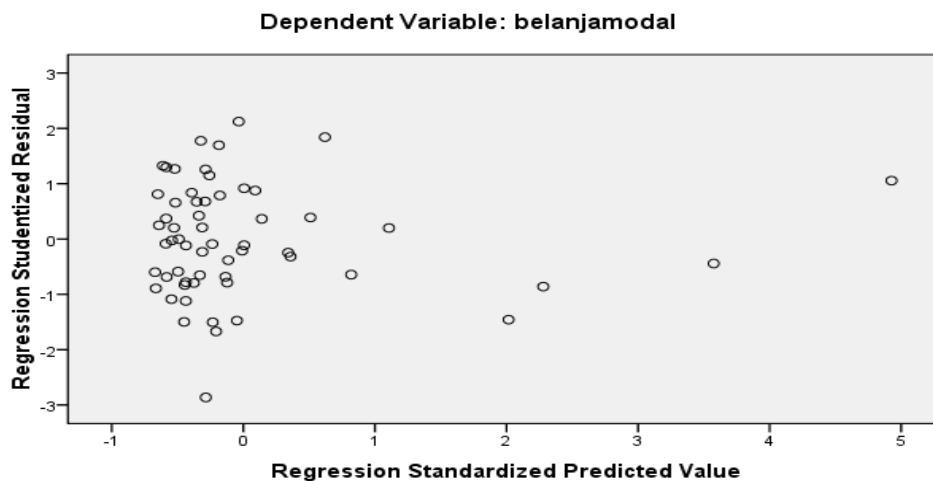
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Tolerance	VIF
	1 (Constant)	137.594	23.664				5.815	.000	90.131
PENDAPATAN ASLI DAERAH	.434	.093	.558	4.665	.000	.248	.621	.373	2.681
DANA ALOKASI UMUM	.017	.028	.050	4.626	.534	.073	.038	.844	1.185
SILPA	.012	.076	.020	3.158	.875	.140	.164	.349	2.867
PERTUMBUHAN EKONOMI	2.425	.720	.339	3.369	.001	.981	3.869	.526	1.900

a. Dependent Variable:
PENGALOKASIAN BELANJA MODAL

- Hasil Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot



- Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^d

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.847 ^a	.717	.696	68.65553	1.894

a. Predictors: (Constant), PERTUMBUHAN EKONOMI, DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH, SILPA

b. Dependent Variable: PENGALOKASIAN BELANJA MODAL

Lampiran 4. Hasil Persamaan Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	137.594	23.664		5.815	.000
PENDAPATAN ASLI DAERAH	.434	.093	.558	4.665	.000
DANA ALOKASI UMUM	.017	.028	.050	4.626	.534
SILPA	.012	.076	.020	3.158	.875
PERTUMBUHAN EKONOMI	2.425	.720	.339	3.369	.001

a. Dependent Variable: PENGALOKASIAN BELANJA MODAL

PENGUJIAN HIPOTESIS

• HASIL UJI F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	633079.976	4	158269.994	33.577	.000 ^a
	Residual	249819.804	53	4713.581		
	Total	882899.780	57			

a. Predictors: (Constant), PERTUMBUHAN EKONOMI, DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH, SILPA

b. Dependent Variable: PENGALOKASIAN BELANJA MODAL

• Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.847 ^a	.717	.696	68.65553	.717	33.577	4	53	.000

a. Predictors: (Constant), PERTUMBUHAN EKONOMI, DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH, SILPA

b. Dependent Variable: PENGALOKASIAN BELANJA MODAL

- Hasil Uji t

Varaibel	Koef.	T	Sig	Hasil	Keterangan
Konstanta	137.594	5.815	.000		
PAD	.434	4.665	.000	Signifikan	Ho ditolak
DAU	.017	4.626	.534	Tidak Signifikan	Ho diterima
SiLPA	.012	3.158	.875	Tidak Signifikan	Ho diterima
PE	2.425	3.369	.001	Signifikan	Ho ditolak